



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PROSES REKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TAHUN 2010
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

TESIS



**HENDRIZAL
05 202 051**

**PROGRAM STUDI PWI) KONSENTRASI PEMUSATAN POLOKDA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Kabupaten Pasaman Barat

Oleh : Hendrizal

(Dibawah Bimbingan Dr.Sri Zul Chairiyah, MA dan DR.Azwar,MSi)

Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik, mengidentifikasi kriteria yang digunakan serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses rekrutmen tersebut di Kabupaten Pasaman Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan pengumpulan data dokumentasi. Informan utamanya adalah pengurus partai politik dan gabungan partai politik. Untuk pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan data yang sudah ada dengan beberapa informan yang berbeda yakni calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendaftarkan ke partai politik dan gabungan partai politik serta membandingkan data dengan dokumen yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen yang dilakukan ada secara formal dan ada secara informal. Secara formal, proses rekrutmen dilakukan melalui beberapa tahapan. Secara informal, proses rekrutmen dilakukan tidak hanya pada saat proses pilkada akan dimulai tetapi jauh sebelum itu, kemudian antara partai dengan calon yang ada semacam pendekatan atau lobi-lobi sebelum calon memasuki tahapan formal tersebut.

Kesimpulan dalam penelitian adalah jika dilihat dari prosesnya, rekrutmen calon kepala daerah dapat dibedakan menjadi dua tipe, pertama, rekrutmen dilakukan melalui suatu proses yang panjang karena antara partai politik dengan calon sudah terjalin hubungan dan komunikasi jauh sebelum proses rekrutmen itu dimulai. Kedua, rekrutmen dilakukan secara dadakan, artinya antara partai politik dengan calon baru saling mengenal dan baru mulai menjalin komunikasi pada saat proses rekrutmen itu akan dilakukan. Selain itu, dilihat dari proses penetapan calon yang dilakukan partai politik sangat oligarkis, dan dalam menetapkan kriteria calon pun partai politik sangat pragmatis sehingga kriteria yang ditetapkan lebih bersifat primordial.

Candidate Recruitment Process of Regional Head and Deputy Head of the Region in 2010 IN West Pasaman

By: Hendrizal

(Under the Guidance Dr.Sri Zul Chairiyah, MA and DR.Azwar, MSI)

Summary

This study aimed to describe the process of recruiting candidates for regional head and deputy head of the region conducted by political parties, Identify the criteria used and to analyze what factors are affecting the recruitment process in the West Pasaman

The method used in this research is descriptive method with approach of qualitative analysis. Data collection was performed with in-depth interviews and data collection documentation. Informants main political party officials and political parties combined. To check the validity of the data was done by membadingkan existing data with several different informants namely prospective regional head and deputy head of the register to political parties and coalitions of political parties as well as comparing the data with an existing document.

The results showed that the recruitment process is conducted formally and informally exist. Formally, the process of recruitment is done through several stages. Informally, the recruitment process conducted not only at the time of the election process would start but long before that, then between the parties with candidates who have a kind of approach or the lobbies before the candidate enters the formal stage.

Viewed from the process, the recruitment of candidates for chief daearh can be divided into two types: first, recruitment is done through a long process because of the political party with candidates already established relationships and communication long before the recruitment process begins. Second, recruitment is done impromptu, meaning between a new political party with candidates only beginning to know each other and establish communication at the time of the recruitment process will be carried out.

In addition, the views of the process of determining which candidates performed very oligarchic political parties, and in setting criteria for candidates for any political party that is very pragmatic criteria are more primordial.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Tesis yang saya tulis dengan judul :

“Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Pasaman Barat “

Adalah hasil kerja saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan dan sumbernya dicantumkan. Jika kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka status dan kelulusan yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 03 Mei 2011

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL
PAJAK HEBANGUN BANGSA
TGL. 20

A4DEDAAF300414225

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

HENDRIZAL

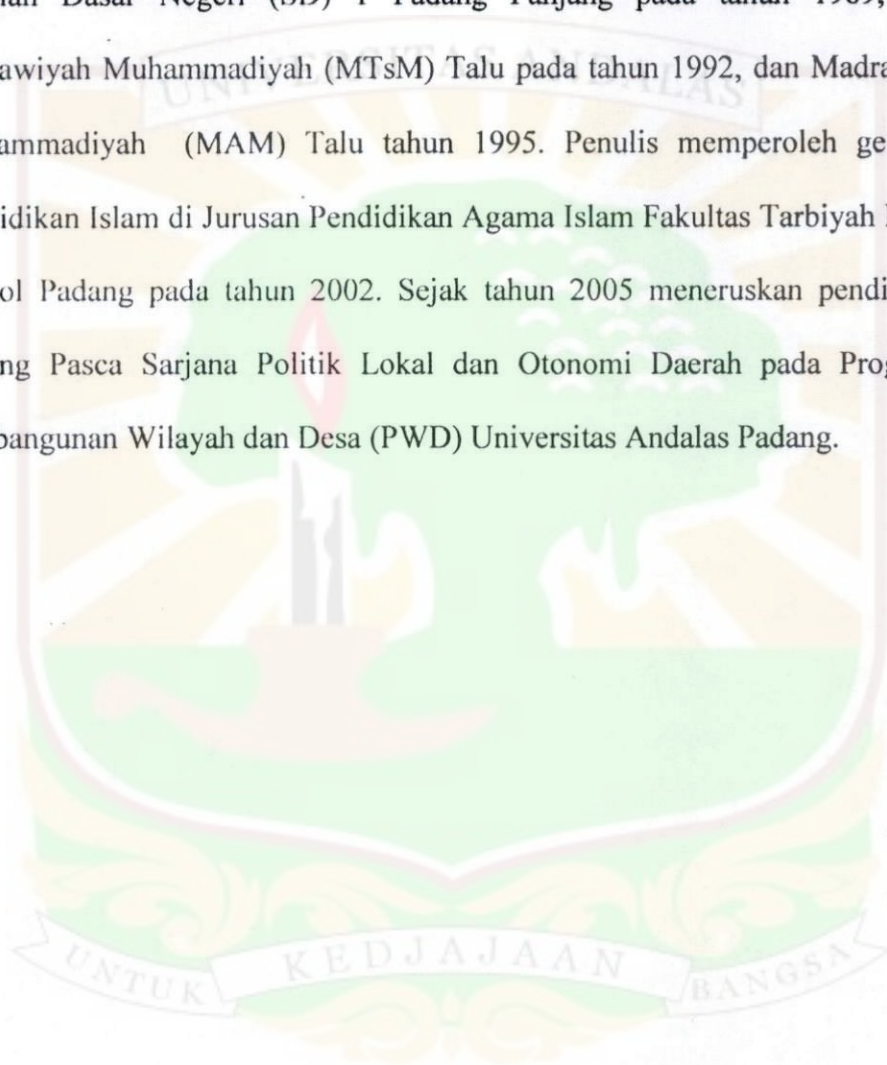
UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Talu pada tanggal 3 Juni 1976, merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Zainal Karim dan Ibu Nurhaida, menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SD) 1 Padang Panjang pada tahun 1989, Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (MTsM) Talu pada tahun 1992, dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) Talu tahun 1995. Penulis memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2002. Sejak tahun 2005 meneruskan pendidikan pada jenjang Pasca Sarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah pada Program Studi Pembangunan Wilayah dan Desa (PWD) Universitas Andalas Padang.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat melaksanakan penyelesaian Tesis ini tentang: “Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Kabupaten Pasaman Barat”. Tesis ini dibuat untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Megister of Sain pada program Pascasarjana Politik Lokal Otonomi Daerah Universitas Andalas Padang.

Terlaksananya penelitian hingga selesai penulisan teisis ini, tidak terlepas dari bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Sri Zul Chairiyah, M.A selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Azwar Msi selaku pembimbing kedua, yang telah berkenan memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk mulai dari akan dilaksanakannya penelitian hingga tersusunya tesis ini.

Ucapan terima kasih, juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyelesaian tesis ini, khususnya kepada :

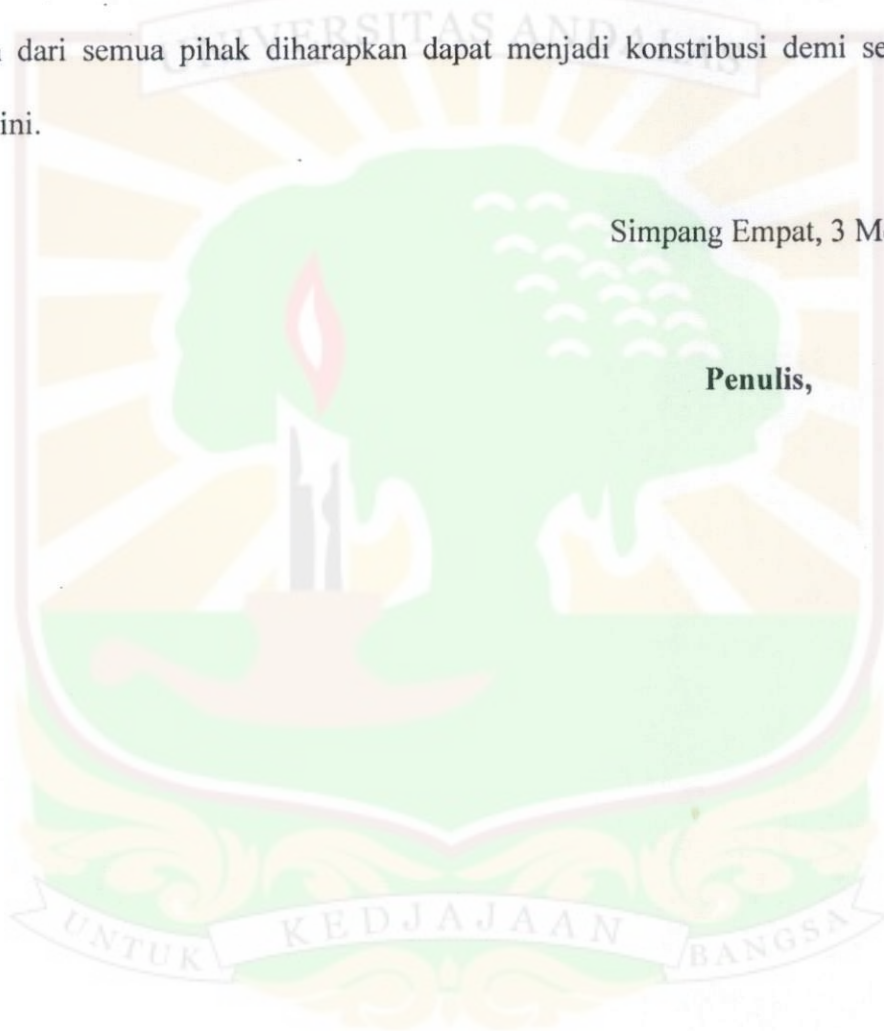
1. Bapak Rektor Universitas Andalas
2. Bapak Direktur besreta staf program pasca Sarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Asmawi, MA, Bapak Dr. Elfitra, Msi dan Bapak Drs. Tamrim, Msi selaku penguji dalam memberikan masukan dan penyempurnaan tesis ini.
4. Bapak Bupati Pasaman Barat yang telah memberikan kesempatan luas pada kami untuk melakukan penelitian diwilayah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Ucapan terimakasih yang tak terhingga untuk istriku yang telah memotifasi, membantu dan merelakan waktu bersama tersita untuk menyelesaikan tesis ini.

6. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam studi hingga selesainya tesis ini.

Terakhir, penulis berharap tesis yang dituangkan dalam tulisan ini akan bermanfaat dalam pedoman pelaksanaan penelitian dilapangan dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang, dan tidak lupa kritik dan saran dari semua pihak diharapkan dapat menjadi konstribusi demi sempurnanya tesis ini.

Simpang Empat, 3 Mei 2011

Penulis,



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu Yang Relevan	15
B. Tinjauan Teoritis	17
a. Partai Politik	17
b. Rekrutmen Politik	20
c. Kepemimpinan	27
d. Pemilukada.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	32
B. Metode Penelitian	33
C. Unit Analisis	34
D. Teknik Pemilihan Informan	35
E. Teknik pengumpulan Data	37
F. Analisis Data dan Pemeriksaan Keabsahan data	40

G. Proses penelitian	42
----------------------------	----

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Partai Politik	47
1. Partai Politik Peserta Pemilu 2009	47
2. Partai Politik yang Memperoleh Kursi DPRD	49
3. Partai Politik yang Mengajukan Pasangan Calon	51

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Rekrutmen Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	55
1. Tahap Persiapan	55
a. Penjajakan Koalisi	55
b. Penyusunan Peraturan Rekrutmen	58
2. Tahap Penjaringan	59
a. Pengumuman dan Pengambilan formulir	60
b. Pendaftaran	63
3. Tahap Penyaringan / Seleksi	65
4. Penetapan	67
B. Kriteria Calon	72
C. Faktor yang Mempengaruhi Proses Penetapan Calon	76
D. Analisis Interpretasi Data	81

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan	89
2. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Daftar Perolehan Suara dan kursi DPRD Kab. Pasaman Barat Tahun 2009.....	5
2. Daftar Nama Parpol dan gabungan Parpol serat calon perseorangan yang mendaftar ke KPU Pasaman Barat	6
3. Daftar Jumlah Informan.....	37
4. Jumlah Kecamatan, nagari dan jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat....	46
5. Jumlah kecamatan, PPS dan jumlah pemilih kabupaten Pasaman Barat	47
6. Daftar Partai politik peserta Pemilu tahun 2009.....	48
7. Urutan Rank perolehan kursi Parpol untuk DPRD Pasaman Barat Th. 2009	50
8. Daftar nama Parpol dan gabungan Parpol yang mengajukan pasangan calon kepala Daerah Th. 2010 sebelum di veifikasi oleh KPU Pasaman Barat.....	53
9. Daftar nama Parpol dan gabungan Parpol yang mengajukan pasangan calon kepala Daerah Th. 2010 sebelum di veifikasi oleh KPU Pasaman Barat.....	54
10. Daftar calon yang mengambil formulir di Parpol.....	61
11. Daftar Parpol atau Gabungan Parpol yang mendaftar atau mengembalikan formulir	64
12. Perolehan suara masing-masing calon Kepala Daerah.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Daerah yang telah bergulir sejak kemerdekaan bangsa Indonesia mengalami perubahan dalam pelaksanaannya, demikian juga dengan kepemimpinan pemerintahan di Indonesia mengalami berbagai perubahan menuju demokrasi yang diharapkan.¹ Adanya kebutuhan dan tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik yaitu pemerintahan yang demokratis, kuat dan efektif, merupakan faktor utama terjadinya perubahan dalam kepemimpinan, karena pemerintahan yang baik akan dapat terwujud apabila ditopang dengan sistem kepemimpinan yang baik.

Seiring dengan kecenderungan tuntutan organisasi untuk lebih mampu mengakomodir kebutuhan dan aspirasi anggotanya, tuntutan kepemimpinan akan cenderung mengarah pada pengembangan kualitas kepemimpinan yang demokratis, kuat dan efektif dengan ciri-ciri yang menonjol, antara lain visi, misi, nilai, keberanian, integritas dan harmoni.²

Untuk mewujudkan sebuah kepemimpinan yang demokratis, kuat, efektif, dan juga responsif haruslah melalui suatu proses yang juga demokratis, artinya kepemimpinan yang demokratis akan lahir apabila proses rekrutmen pemimpin itu juga dilakukan secara demokratis dan transparan. Secara formal UU No. 32 tahun 2004 yang revisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka peluang bagi sistem pemilihan kepala daerah

¹ Ermaya, Suradinata. *Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan dalam Politik dan Bisnis*. Suara Bebas. Jakarta, 2006. hal v

² *Ibid.* hal 125

yang demokratis sehingga masyarakat dapat memilih langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dianggap mampu memimpin daerahnya serta dapat mengerti dan memahami kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 yang revisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah dan PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, telah diatur mengenai pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Rakyat dapat memilih langsung calon yang diinginkan dan dianggap mampu memimpin daerahnya.

Menurut Djohan (2003), Pemilihan langsung akan menutup peluang bagi pencalonan kepala daerah yang tidak dikehendaki oleh masyarakat daerah, yang tidak dikenal track record-nya, lebih menjamin akuntabilitas pemerintah daerah, dan lebih kuatnya derajat legitimasi kepala daerah, sehingga pada akhirnya akan membuahkan pemerintah daerah yang lebih efektif.³ Disini berarti terbuka peluang bagi calon perseorangan yang bukan anggota atau kader partai.

Namun sebelum masyarakat secara langsung memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, UU No. 32 tahun 2004 yang beberapa pasalnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah memberikan kewenangan kepada partai politik untuk memproses bakal calon tersebut sebelum ditetapkan menjadi calon yang akan dipilih oleh masyarakat. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan, Jadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dipilih oleh rakyat adalah orang pilihan yang telah melalui

³ Suradinata *Op.cit.* hal 200

proses seleksi di tingkat *partai* politik dan dukungan dari masyarakat bagi calon perseorangan. Namun demikian, calon yang ditetapkan oleh partai politik belum tentu diterima oleh masyarakat dan sebaliknya calon yang track-recordnya sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat belum tentu akan dicalonkan oleh partai politik.

UU No. 32 tahun 2004 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah mengatur bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik, khususnya dalam pasal 59 ayat 1 bahwa “peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah : 1. pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 2. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.”⁴

Meskipun tidak menutup kesempatan bagi calon perseorangan atau calon dari luar partai politik untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 59 ayat 2 dan 4 bahwa “partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat wajib dalam proses penetapan pasangan calon.”⁵ Disini terjadi suatu proses yang disebut proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Menurut Gabriel Almond, rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.” Artinya rekrutmen politik merupakan suatu proses penyeleksian individu untuk jabatan tertentu baik politik maupun pemerintahan,

⁴ UU No. 32 th 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁵ *Ibid*, pasal 59 ayat (3)

proses penyeleksian itu dilakukan melalui beberapa proses seperti pendidikan, ujian, penampilan dan sebagainya.

Proses rekrutmen calon kepala daerah akan sangat menentukan kepemimpinan daerah ke depan. Proses rekrutmen yang baik akan menghasilkan calon kepala daerah yang berkualitas dan sebaliknya proses rekrutmen yang buruk dan tidak transparan tentu juga tidak akan menghasilkan calon kepala daerah yang berkualitas. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah partai politik sudah memproses bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut secara demokratis dan transparan dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Partai Politik yang mencalonkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah Partai Politik hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009. Data hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 sebagaimana yang terinci dalam tabel di bawah ini :



Tabel. 1: Daftar Perolehan Suara Dan Kursi Masing-masing Partai Politik pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.

No Urut Parpol	Partai Politik	Suara Sah	Perolehan Kursi
1.	HANURA	7.170	2
2.	PKPB	1.886	-
3.	PPPI	246	-
4.	PPRN	3.520	1
5.	GERINDRA	2.009	-
6.	BARNAS	940	-
7.	PKPI	8.483	-
8.	PKS	6.776	3
9.	PAN	14.503	4
10.	PPIB	757	-
11.	PARTAI KEDAULATAN	232	-
12.	PPD	-	-
13.	PKB	4.378	1
14.	PPI	1.349	-
15.	PNIM	-	-
16.	PDP	708	-
17.	PKP	729	-
18.	PMB	2.977	-
19.	PPDI	2.174	-
20.	PDK	2.835	-
21.	REPUBLIKAN	2.868	-
22.	PELOPOR	3.258	1
23.	GOLKAR	16.893	5
24.	PPP	13.179	5
25.	PDS	204	-
26.	PNBK	-	-
27.	PBB	6.077	2
28.	PDIP	15.208	5
29.	PBR	5.283	1
30.	PATRIOT	1.658	-
31.	DEMOKRAT	18.227	5
32.	PKDI	-	-
33.	PIS	-	-
34.	PKNU	-	-
40..	PARTAI MERDEKA	-	-
41.	PPNUI	-	-
42.	PSI	-	-
44.	PARTAI BURUH	1.560	-
	JUMLAH	139.087	35

(Sumber ; KPU Kabupaten Pasaman Barat)

Di Kabupaten Pasaman Barat, pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010, ada 4 (empat) pasang calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan 2 (dua) pasang dari calon perseorangan ke KPUD. Data partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan yang mendaftar ke KPU Pasaman Barat tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel. 2: Daftar Nama Partai Politik dan Gabungan Partai Politik serta Peseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendaftar ke KPU di Kabupaten Pasaman Barat.

Nama Parpol atau Gabungan Parpol	Calon yang diajukan	
	Calon Kepala Daerah	Calon Wakil Kepala Daerah
Partai Koalisi Bersama (PPP, Partai Demokrat, Partai Hanura, PPRN, PBR, GERINDRA, PMB, P.KEDAULATAN, PDP, PPPI, PPI, PKPB, P.BURUH, PDK, PKPI dan P.BARNAS)	H.Baharuddin R, (kader partai PPP)	Syahrul Dt. Marajo, (Kader Partai Hanura)
Partai Koalisi (PDI-P,PBB,PPRN, PBR)	H.Risnawanto (Kader Partai PDIP)	H. Nofrizal (Tidak Kader Partai)
Partai Koalisi (P.GOLKAR,PKB,PPDI,Pakar Pangan, P.Republikan, ,PPIB, PPDIB dan P Patriot Pancasila)	H.Syahiran (Tidak Kader Partai)	Asgul (Kader Partai Golkar)
Partai Koalisi (PAN dan PKS)	H.Akmal BB (Tidak Kader Partai)	Epi Santoso (Kader PKS)
Calon Perseorangan	H.Saripada Rangkuti	H. Zulkifli
Calon Perseorangan	Bahder Djohan Nst.	Nazar Ikhwan

(Sumber; KPUD Pasaman Barat)

Apabila dilihat dari komposisi jumlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan gabungan partai politik dan calon Perseorangan yakni 6 (Enam) pasang calon atau 12 (Dua Belas) orang, hanya lima orang diantaranya yang berasal dari kader partai yang mengusungnya, selebihnya adalah calon yang berasal dari luar partai. Yang dimaksud kader dalam partai politik adalah calon anggotanya diadakan penyaringan, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan di syaratkan lulus melalui beberapa tahap seleksi. Untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian ideologi, maka dipungut iuran secara teratur dan disebarkan organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran serta keputusan-keputusan yang dicapai oleh pimpinan. Kenyataan di atas dari segi kader dan tidak kader sepertinya memperlihatkan bahwa proses rekrutmen yang dilakukan Parpol atau gabungan Parpol sudah merupakan aplikasi dari apa yang diamanahkan dalam UU No.32 tahun 2004 khususnya pasal 59 ayat (2 dan 4), karena Parpol sudah mampu mencalonkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari luar partainya.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah kenapa kader partai dapat dikalahkan oleh yang bukan kader partai, apakah ada faktor tertentu yang membuat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari luar partai tersebut mampu mengalahkan kader – kader partai yang mengusungnya. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh calon yang bukan kader partai untuk dapat diterima oleh partai.

Proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik tidak terlepas dari berbagai permasalahan baik permasalahan di internal partai maupun permasalahan antara partai dengan calon yang akan diusung/diajukan ke KPU.

Permasalahan internal partai terjadi karena ada perbedaan pandangan atau prinsip antar pengurus partai baik tingkat kabupaten, tingkat propinsi maupun tingkat pusat atau antar pimpinan partai yang berkoalisi. Sementara permasalahan dengan calon terjadi karena proses yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan, keinginan partai berbeda dengan keinginan calon. Disisi lain calon merasa tidak puas dengan proses rekrutmen dan proses penetapan calon yang dilakukan partai politik atau gabungan partai politik.

Disamping itu, kewenangan yang diberikan UU No. 32 tahun 2004 kepada partai politik yang pada Pemilu Kada Tahun 2005 sebagai satu-satunya sarana bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk maju sebagai calon telah membuka peluang bagi partai politik untuk menetapkan aturan – aturan dan syarat-syarat khusus yang mungkin saja dapat memberatkan calon terutama calon dari luar partai. Tetapi setelah Revisi UU 32 Tahun 2004 menjadi UU No 12 Tahun 2008 meskipun dalam pasal 59 ayat 1 telah memberikan kesempatan untuk pasangan calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang sebagai peserta dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun sesuai dengan pasal 59 ayat (2b dan 2d) interval dukungan kabupaten yang jumlah penduduk dari 250.000 (Dua ratus Lima Puluh Ribu) sampai dengan 500.000 (Lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang dimaksud. Dukungan tersebut dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan photo copy kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan per Undang-Undang.

Menurut Rangkuti, pada pra pemilihan, si calon pasti menyerahkan uang kepada partai politik yang nilainya bervariasi jumlahnya. Ketika Kompas memantau persiapan Pilkada di Denpasar awal April 2004, seorang calon independen mengaku diminta menyiapkan dana ratusan juta rupiah oleh seorang calo partai politik tertentu jika mau maju sebagai calon.⁶

Permasalahan pada tahap rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik sering terjadi. Di Kabupaten Pasaman Barat Eni Kamal yang semula akan dicalonkan oleh Demokrat tetapi batal, menurut Yulianto penyebabnya adalah karena ia tidak mampu menyediakan dana sebesar 3 (tiga) milyar rupiah sesuai dengan yang disyaratkan oleh partai yang bersangkutan.⁷ Pada Pilkada Provinsi Sumatera Barat, pasangan Jeffie Geovanni dan Dasman Lanin yang semula akan dicalonkan oleh PAN akhirnya batal dan PAN tidak lagi mengajukan pasangan calon, ini menyiratkan terjadi persoalan di tubuh PAN itu sendiri, dan Pasangan Jeffie Geovanni dan Dasman Lanin akhirnya justru dicalonkan oleh koalisi *Sakato*⁸. Di Kabupaten Padang Pariaman, persoalan pencalonan juga terjadi, calon yang diusung oleh partai Golkar dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPUD, artinya persoalan terjadi pada tahap pengajuan pasangan calon.

Di Kabupaten Pasaman Barat, persoalan pencalonan juga terjadi, pasangan Perseorangan M Saripada Rangkuti dan Zulkifli merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah dan penyelenggara di tingkat PPS dalam rangka Verifikasi Administrasi dan faktual berkas dukungan calon perseorangan Pemilu kadä Tahun 2010 di Kabupaten Pasaman Barat karena surat dukungan dalam bentuk Surat Keterangan

⁶ Harahap, H. Abdul Asri. *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*. Cidesindo. Jakarta. 2005

⁷ Wawancara dengan ketua Demokrat Pasbar, Minggu 6 Februari 2011 di simpang empat

⁸ Laporan Pilkada Prop. Sumbar 2005

Domisili (SKD) dianggap banyak yang fiktif dan tekanan (Intimidasi) terhadap pejabat yang mengeluarkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yaitu Wali nagari dan penyelenggara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Permasalahan tersebut sampai juga kepada Kepolisian dan pengaduan kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat. Begitu juga yang dialami oleh pasangan calon perseorangan Bahder Johan Nasution dan Nazar Ihkwan sehingga calon perseorangan pun sulit untuk memenuhi persyaratan 5% dukungan minimal dari jumlah penduduk di Kabupaten Pasaman Barat.

Dari berbagai permasalahan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terjadi di berbagai daerah di Sumatera Barat, Menurut Divisi Hukum dan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah yang paling tinggi tingkat permasalahannya dan KPU Kabupaten Pasaman Barat permasalahan pencalonan tersebut sampai melibatkan pihak kepolisian dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumbar karena pasangan Perseorangan H,M Saripada Rangkuti dan H. Zulkifli dan pasangan calon perseorangan DR. Bahder Johan Nasution, dan Nazar Ihkwan menggugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

Menurut pasangan Perseorangan H,M Saripada Rangkuti dan H. Zulkifli dan pasangan calon perseorangan Bahder Johan Nasution dan Nazar Ihkwan, dirinya merupakan pasangan perseorangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah memenuhi persyaratan 5% dukungan minimal dari jumlah penduduk di Kabupaten Pasaman Barat.

Pasangan calon dari partai politik seperti pasangan Ir. Suardi Hasibuan sebagai Ketua PAN dan H. Zamri yang mendaftar sendiri ke Komisi Pemilihan Umum sebanyak 2 (dua) Kali , tetapi atas intruksi DPP dan DPW PAN bahwa PAN berkoalisi dengan PKS akan mengusung H. Akmaluddin Batubara dan Episantoso Pendaftaran calon H. Akmaluddin Batubara dan Episantoso oleh PAN dan PKS sewaktu Suardi Hasibuan sebagai Ketua PAN dan H. Zamri masih duduk di tempat pendaftaran KPU Pasbar, sehingga pada malam itu terjadi tuntutan dan pelaporan kepada kepolisian oleh H. Zamri di Polres Kabupaten Pasaman Barat.

Pencalonan yang terjadi pada koalisi Partai PPRN terjadi dualisme kepengurusan di tingkat kabupaten mengusung calon yang berbeda. Pengurus PPRN versi Firman Umar mencalonkan H.Risnawanto dan H.Nofrizal sedangkan versi Pasrial mencalonkan H.Baharuddin R dan H.Syahrul Dt.Marajo, sehingga sampailah penyelesaiannya ke Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia di Jakarta untuk mengkarifikasi mana yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pencalonan pada internal tubuh partai PKB terjadi perbedaan dukungan Ketua mendukung H.Syahiran dan Asgul sedangkan sekretaris mendukung H.Baharuddin R dan H.Syahrul Dt.Marajo, maka terjadilah penggantian sekretaris PKB tingkat kabupaten oleh DPP PKB waktu masa perbaikan berkas pencalonan.

B. Rumusan masalah

Permasalahan dalam proses rekrutmen calon kepala daerah seperti yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa partai politik kita belum cukup efektif dalam melaksanakan fungsi rekrutmennya. Dan begitu juga pasangan calon perseorangan

yang didukung oleh 5% dukungan minimal dari jumlah penduduk di Kabupaten Pasaman Barat belum cukup efektif di dalam memenuhi persyaratan tersebut.

Apabila kita melihat bahwa di Kabupaten Pasaman Barat terdapat enam pasang calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Pasaman Barat 4 pasang diusung oleh gabungan partai politik dan dua pasang dari calon perseorangan. Yang lolos dari verifikasi administrasi dan faktual hanya 4 pasang yang mengikuti pemilihan kepala daerah, lima orang diantaranya berasal dari kader partai dan dua lainnya berasal dari luar partai (calon perseorangan) sebagaimana dalam table 2 (dua). Persoalan yang kemudian muncul adalah, apakah calon – calon perseorangan atau calon dari luar partai tersebut ditetapkan setelah melalui proses seleksi berdasarkan kualitas atau “kuantitas”nya, artinya apakah calon itu ditetapkan karena akseptabilitas dan kredibilitasnya atau karena kemampuannya membayarkan sejumlah uang kepada partai politik. Serta apakah calon dari kader partai juga mengikuti proses seleksi sebagaimana calon dari luar partai, bagaimana proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, apakah sudah dilakukan secara demokratis dan transparan, apakah proses pemenuhan dukungan minimal syarat calon dan verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan sudah sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (2 dan 4) UU No. 32 Tahun 2004 yang revisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Kemudian kriteria dan syarat yang ditetapkan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, apakah kriteria dan syarat tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan UU, apakah berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, atau kriteria tersebut ditetapkan untuk kepentingan partai politik.

Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses seleksi dan penetapan pasangan calon, apakah karena kualitas dalam arti kemampuan dari calon yang bersangkutan atau karena “kuantitas” dalam arti kemampuan dari segi finansialnya. Apakah dalam proses penetapan calon tersebut partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat, dan yang lebih penting adalah bagaimana proses itu dilaksanakan. Sampai saat ini belum ada penelitian yang mengkaji masalah ini.

Berdasarkan persoalan tersebut, maka saya ingin melihat dan memahami bagaimana proses rekrutmen itu dilakukan oleh partai politik, artinya bagaimana proses disetiap tahapan yang dilakukan oleh Partai Politik dalam penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010. Maka pertanyaan yang ingin di jawab dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik dan gabungan partai politik di Kabupaten Pasaman Barat ?
2. Standar apa yang digunakan oleh partai politik dan gabungan partai politik dalam melakukan rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses rekrutmen dan penetapan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik dan gabungan partai politik tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik dan gabungan partai politik di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Mengidentifikasi standar yang digunakan oleh partai politik dan gabungan partai politik dalam melakukan rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik dan gabungan partai politik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Secara akademis bermanfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu politik lokal dan otonomi daerah serta sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti masalah-masalah politik dan pemilukada.
2. Secara praktis bermanfaat bagi pemerintah dan partai politik dalam mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu tahapan dalam memilih atau menetapkan seorang pemimpin di daerah. Sebelum membahas tentang proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, terlebih dahulu akan dilihat penelitian – penelitian yang pernah dilakukan yang relevan dengan pembahasan tentang proses rekrutmen tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang konsep Partai Politik, Rekrutmen politik, Kepemimpinan dan Pemilu.

A. Tinjauan Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian tentang proses rekrutmen ini pernah dilakukan oleh Syamsudin Haris. Ia meneliti tentang proses pencalonan legislatif oleh partai politik pada pemilu 2004, penelitian tersebut menggambarkan tentang bagaimana calon dipilih dan didaftarkan ke KPU. Secara umum terlihat bahwa rekrutmen calon tidak dilakukan melalui mekanisme penjurian dan tidak didasarkan pada kualitas calon, dari segi prosedur dan mekanisme pencalonan, elit partai di daerah sangat diuntungkan karena pedoman penyusunan dikeluarkan oleh pimpinan partai mereka, proses pencalonan didominasi oleh pemenuhan aspek2 teknis administratif ketimbang kualifikasi dan kualitas para calon, proses pencalonan berlangsung tertutup dan tidak diketahui masyarakat, dari 3 tahap penting pencalonan (penjurian, penyaringan, dan penetapan dalam daftar dan no urut), tahap penetapan merupakan proses yang sangat tertutup dan oligarkis karena hanya ditentukan oleh segelintir elit partai (Ketua dan

sekretaris partai tingkat Kab/Kota), serta ketentuan porsi 30% bagi caleg perempuan tidak terpenuhi terutama oleh partai-partai besar.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan Yudi Oktoveri yang meneliti tentang mekanisme rekrutmen calon anggota legiaslatif oleh PAN, PKS, dan PBB Sumatera Barat pada pemilu 2004. Permasalahan penelitian adalah bagaimana mekanisme rekrutmen itu dilakukan dan faktor – faktor yang dipertimbangkan dalam proses rekrutmen tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam proses rekrutmen calon legisltif, ketiga partai politik tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain tahap penjangingan, proses seleksi dan penetapan nomor urut calon, namun dalam penetapan calon tetap menjadi kewenangan DPP atau oleh PAN disebut Bapilu (badan pemenangan pemilu) dan oleh PBB disebut KAPPU (komite aksi pemenangan pemilu).

Penelitian tentang rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik jelas berbeda dengan penelitian tersebut karena penelitian tentang rekrutmen calon kepala daerah lebih memfokuskan pada bagaimana calon – calon tersebut lahir dan bersaing serta ditetapkan di tingkat partai politik atau gabungan partai politik untuk didaftarkan ke KPU Kabupaten.

Penelitian tentang rekrutmen calon kepala daerah yang pernah dilakukan adalah penelitian Roza Indriani yang meneliti tentang mekanisme rekrutmen calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat oleh PBB – PDI.P. penelitiannya memfokuskan pada proses rekrutmen dan koalisi antara PBB dengan PDI.P. Dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa kedua partai politik tersebut berkoalisi untuk memenuhi syarat 15% kursi DPRD untuk dapat mengajukan pasangan calon. Rekrutmen calon gubernur dan wakil gubernur diawali dengan

rekrutmen di internal masing-masing partai, baru kemudian dilakukan kesepakatan untuk menetapkan pasangan calon. Ia hanya melihat tahapan-tahapan yang dilakukan secara formal.

Penelitian tentang proses rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik yang dilakukan ini jelas berbeda dengan penelitian tersebut karena penelitian ini adalah ingin mengkaji bagaimana calon kepala daerah itu diseleksi dan ditetapkan. Bagaimana setiap tahapan itu dilakukan baik secara formal maupun informal. Artinya, penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana tahapan-tahapan dari proses rekrutmen tersebut dilakukan, tetapi juga melihat apa yang sebenarnya terjadi dibalik setiap tahapan tersebut.

B. Tinjauan Teoritis

1. Partai politik

a. Pengertian

Menurut Miriam Budiardjo, secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁹

Carl J. Friedrich berpendapat, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Jakarta 2005, hal. 160-161

partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.¹⁰

Hal senada diungkapkan R.H. Soltau bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.¹¹

Sigmund Neumann mengungkapkan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.¹²

Menurut Ramlan, partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.¹³

Dari berbagai pendapat tentang partai politik dapat disimpulkan bahwa Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir yang mempunyai motivasi dan ideologi tertentu yang

¹⁰ *Ibid* hal. 161

¹¹ *Ibid*, hal.161

¹² Miriam Budiardjo *Op.cit*, hal 162

¹³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Jakarta, 1999. hal. 116

bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di dalam pemerintahan.

b. Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik menurut Ramlan¹⁴ adalah

1. sosialisasi politik
2. rekrutmen politik
3. partisipasi politik
4. pemadu kepentingan
5. komunikasi politik
6. pengendalian konflik
7. kontrol politik

Selanjutnya, Miriam membedakan fungsi partai politik ke dalam

4 (empat) fungsi¹⁵ yaitu:

1. sebagai sarana komunikasi politik
2. sebagai sarana sosialisasi politik
3. sebagai sarana rekrutmen politik
4. pengatur konflik

Dari beberapa fungsi partai politik yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, fungsi rekrutmen merupakan salah satu fungsi yang sangat menentukan arah pembangunan politik ke depan, melalui fungsi rekrutmennya partai politik akan dapat melahirkan pemimpin

¹⁴ *Ibid*, hal. 117-121

¹⁵ Miriam *Op.cit*, hal. 163-164

yang berkualitas, demokratik, kuat dan efektif yang mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

2. Rekrutmen Politik

a. Pengertian dan Proses Rekrutmen

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.¹⁶

Menurut Later G Seligmen dalam Afan Gaffar, rekrutmen politik pada hakikatnya adalah proses penempatan tokoh-tokoh pada posisi tertentu. Pemilihan dan pengangkatan tokoh-tokoh politik adalah suatu transformasi seleksi terhadap anggota masyarakat untuk menempati peranan khusus dalam suatu sistem politik.¹⁷

Selanjutnya Seligmen dalam Tangkilisan (2003) mengemukakan, rekrutmen sebagai suatu proses terdiri dari¹⁸ :

1. Penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada eligibilitas (pemenuhan syarat pencalonan)
2. Pencalonan atau proses dua tahap yang mensyaratkan inisiatif dan penguatan
3. Seleksi, yakni pemilihan calon elit politik yang sebenarnya.

¹⁶ Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta. 1999, hal. 118

¹⁷ Gaffar Affan. *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*. Rajawali. Jakarta 1989, hal. 113

¹⁸ Tangkilisan. *Kebijakan Publik yang Membumi*. YPAPI. Yogyakarta. 2003. hal. 190

Dalam proses rekrutmen diperlukan adanya suatu sistem yang mengatur pelaksanaan rekrutmen tersebut. Sistem yang digunakan partai politik dalam proses rekrutmen bakal calon berbeda-beda. Menurut Prihatmoko (2005), ada dua sistem rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik;

1. Sistem pemilihan tertutup

Sistem pemilihan tertutup adalah sistem rekrutmen bakal calon yang dilakukan hanya oleh pengurus partai politik dengan berbagai variasi sistem.

2. Sistem konvensi

Sistem konvensi dilakukan dengan cara pemilihan pendahuluan terhadap bakal calon dari partai politik oleh pengurus dan/atau anggota partai sebagaimana dilakukan Partai Golkar dalam Pemilu Presiden / Wakil Presiden 2004.

Hal yang sama dikemukakan oleh Nazaruddin Syamsudin sebagaimana dikutip oleh Tangkilisan bahwa, sistem rekrutmen politik dibedakan menjadi dua yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warganegara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Rekrutmen tertutup yaitu adanya batasan dalam hal penyeleksian sehingga tidak setiap warganegara dapat ikut serta dalam proses penyeleksian tersebut. Dalam sistem tertutup ini orang akan mendapatkan posisi elit melalui

cara – cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain.¹⁹

Disamping itu, Rush dan Althoff mengemukakan bahwa proses rekrutmen memiliki keragaman yang tiada batas, ada yang menggunakan metode ujian, latihan, giliran atau rotasi, namun dalam pelaksanaannya ada cara-cara tertentu yang digunakan dalam proses rekrutmen tersebut salah satunya adalah cara *patronage*. Patronage merupakan bagian dari suatu sistem penyuapan dan sistem korupsi yang rumit, yang memasuki banyak bidang kehidupan masyarakat. Cara ini juga merupakan salah satu sarana bagi pengrekrutan politik karena untuk masuk menjadi anggota parlemen dan dinas sipil embrionik, hampir selalu dapat dipastikan harus melalui sistem patronage.²⁰

Dalam proses rekrutmen calon kepala daerah pada Pemilu kada 2010 khususnya di Kabupaten Pasaman Barat, partai politik atau gabungan partai politik menggunakan sistem konvensi atau sistem terbuka sebagaimana yang dikemukakan oleh prihatmoko dan Nazaruddin. Partai politik melakukan pemilihan pendahuluan terhadap para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun pemilihan pendahuluan yang dilakukan partai politik tidaklah dengan cara pemilihan langsung oleh pemilih akan tetapi pemilihan pendahuluan hanya dilakukan oleh pimpinan dan anggota partai politik. Dalam melakukan kegiatan tersebut partai politik membuka

¹⁹ Tangkilisan. *Kebijakan Publik yang Membumi*. YPAPI. Yogyakarta. 2003. hal. 190

²⁰ Rush Michael, *op.cit*, hal. 186

akses atau kesempatan bagi setiap warga masyarakat yang telah mempunyai hak pilih untuk ikut dalam seleksi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik kader partai maupun bukan kader partai.

Selanjutnya Miftah Thoha dalam Tangkilisan mengemukakan bahwa ada tiga sistem yang sering digunakan dalam proses rekrutmen, yaitu²¹;

1. Sistem patronit. Sistem ini dikenal dengan sistem kawan karena proses rekrutmen didasarkan pada pertimbangan bahwa yang bersangkutan merupakan kawan dekat, famili, asal daerah yang sama, dan juga didasarkan karena satu aliran politik, ideologi dan keyakinan yang sama tanpa memperhatikan keahlian dan keterampilan.
2. Sistem merita. Sistem ini lebih bersifat objektif, proses rekrutmen didasarkan atas jasa kecakapan seseorang dalam usaha mengangkat atau menduduki pada jabatan tertentu. Di Indonesia sistem ini dinamakan sistem jasa.
3. Sistem karir. Sistem ini lebih mengutamakan rekrutmen berdasarkan pada suatu kemajuan seseorang yang dicapai lewat usaha yang dilakukan secara dini dalam kehidupannya baik dunia kerja maupun politik.

Proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan partai politik pada Pemilu pada Pasaman Barat tahun 2010 mengacu pada proses rekrutmen sebagaimana yang

²¹ Tangkilisan *Op.cit*, hal. 189

dikemukakan oleh Seligmen bahwa ada tahapan dalam proses rekrutmen, antara lain tahap penyaringan, tahap pencalonan, dan tahap seleksi. Sedangkan sistem yang digunakan dalam proses rekrutmen tersebut adalah sistem patronit sebagaimana yang dikemukakan Miftah Thoha.

b. Kriteria rekrutmen

Menurut Tangkilisan (2003), ada dua kriteria khusus dalam proses rekrutmen yaitu kriteria universal dan kriteria partikularistik;

1. Kriteria universal merupakan proses rekrutmen dilakukan berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditunjukkan lewat tes atau ujian dan prestasi.
2. Kriteria partikularistik merupakan proses rekrutmen yang bersifat primordial yang didasarkan pada suku, agama, ras, keluarga, almamater atau faktor status.

Dalam bukunya, *Comparative Politics: a Developmental Approach*, New York: Amerind Publishing, 1966, p.47-48, Gabriel Almond dan Bingham Powell, Jr, menyebutkan adanya tiga kriteria rekrutmen politik sebagai dasar dari pengelompokan mekanisme rekrutmen tersebut, kriteria rekrutmen yang dimaksud adalah:²²

1. Kriteria Umum; penyeleksian para pemegang jabatan dilakukan melalui pemilihan atau melalui berbagai

²² Afan Gaffar, "Demokrasi Empiris dalam Orba", dalam Alfian dan Nazaruddin Syamsuddin (Ed...). *Profil Budaya Politik Indonesia*. Grafiti Jakarta, 1991. hal. 155

kemampuan dan kecakapan, serta penampilan sebagai suatu tujuan;

2. Kelompok Etnis, menggambarkan rekrutmen yang didasarkan atas kriteria khusus;
3. Status, yakni penyeleksian atas dasar keluarga kerajaan atau keluarga aristokrat.

c. Faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen politik

Dalam rekrutmen politik terutama untuk jabatan – jabatan politik atau administrasi maupun pemerintahan, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi baik proses maupun hasil yang akan ditetapkan. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan sistem rekrutmen yang dilakukan. Sebagaimana yang dikemukakan Nazaruddin, apabila sistem yang digunakan adalah sistem tertutup, maka tidak tertutup kemungkinan para agen maupun para calon akan menempuh cara cara yang tidak rasional.

Disamping itu, menurut Rush dan Althoff, dalam proses perekrutan tersebut, terdapat cara-cara atau alat yang digunakan, salah satunya adalah cara patronage. Patronage merupakan bagian dari suatu sistem penyuapan dan sistem korupsi yang rumit, yang memasuki banyak bidang kehidupan masyarakat. Cara ini juga merupakan salah satu sarana bagi perekrutan politik karena untuk masuk menjadi

anggota parlemen dan dinas sipil embrionik, hampir selalu dapat dipastikan harus melalui sistem patronage.²³

Cara – cara seperti yang dijelaskan di atas jika dilakukan akan sangat berpengaruh terhadap hasil rekrutmen yang pada akhirnya juga akan sangat berpengaruh terhadap elit atau pemimpin yang akan dilahirkan.

Pada pelaksanaan pilkada di Indonesia, sistem rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik adalah sistem rekrutmen sebagaimana dijelaskan Prihatmoko dan Gabriel Almond bahwa sistem rekrutmen ada yang tertutup dan ada yang terbuka (sistem konvensi). Namun, metode rekrutmen dengan cara – cara atau alat sebagaimana yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff tersebut juga telah terjadi di Indonesia. Dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilakukan mulai tahun 2005, cara patronage dapat dikatakan sebagai salah satu cara yang diambil oleh pasangan calon dan sebagai alat yang digunakan oleh partai politik di dalam proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Partai politik menetapkan tarif “sewa kendaraan” bagi calon yang ingin mendaftar ke partai politik yang bersangkutan dan pasangan calon menyerahkan sejumlah uang kepada partai politik agar dapat ditetapkan sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan didaftarkan ke KPUD. Kalau hal ini menjadi faktor penentu bagi partai politik dalam menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala

²³ Rush Michael, *op.cit*, hal. 186

daerah yang akan didaftarkan ke KPUD, maka tidak tertutup kemungkinan pasangan calon yang diajukan bukanlah orang pilihan yang berkualitas melainkan hanyalah orang-orang yang mengejar kedudukan dan mampu melakukan segala cara untuk mencapai tujuan.

3. Kepemimpinan

Proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesungguhnya merupakan proses pencarian atau penyeleksian seorang pemimpin. Penyeleksian pemimpin ditujukan agar mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar mampu memimpin daerahnya, seorang pemimpin yang demokratis, aspiratis dan yang mempunyai integritas sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya.

Menurut Cribb (1990:12), kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh konsensus dan ikatan pada sasaran bersama, melampaui syarat-syarat organisasi yang dicapai dengan pengalaman, sumbangan dan kepuasan di pihak kelompok kerja.²⁴ Sementara itu, Ronald Heifetz dan Laurie (1998) berpendapat, kepemimpinan masa depan adalah seorang pemimpin yang adaptif terhadap tantangan, peraturan yang menekan, memperhatikan pemeliharaan disiplin, memberikan kembali berbagai keberhasilan organisasi kepada karyawan, dan menjaga kepemimpinannya.²⁵

Sadu Wasistiono (2005) juga mengemukakan, kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan dan pengaruh, yaitu kemampuan

²⁴ Ermaya. *Op.cit*, hal. 165

²⁵ *Ibid*, hal.165

mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara berkala.²⁶ Sementara Kartini Kartono mendefinisikan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.²⁷

Pemimpin seperti yang digambarkan Heifetz dan Laurie serta Sadu Wasistiono dan Kartini Kartono di atas, dapat dikategorikan dalam pemimpin yang berkualitas. Namun untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas haruslah melalui berbagai proses, salah satunya adalah proses rekrutmen. Akan tetapi proses rekrutmen yang kurang baik tidak akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Oleh karena itu, kriteria yang digunakan serta proses penetapan calon dalam proses rekrutmen tersebut akan sangat menentukan kualitas kepemimpinan seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Konsep kepemimpinan dalam penelitian ini mengacu pada konsep kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ronald Heifetz dan Laurie bahwa kepemimpinan yang baik akan lahir dari seorang pemimpin yang berkualitas, yang adaptif terhadap tantangan, peraturan yang menekan, memperhatikan pemeliharaan disiplin, memberikan kembali berbagai keberhasilan organisasi kepada karyawan, dan menjaga kepemimpinannya. Kepemimpinan dalam penelitian ini adalah

²⁶ Sadu Wasistiono, *Pemilihan kepala daerah secara Langsung dan masa depan pemerintahan Daerah*. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah. Vol, II Edisi kelima 2005, hal. 3

²⁷ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hal. 38

kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat.

4. Pemilukada

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah langsung merupakan salah satu bentuk sistim rekrutmen pemimpin publik di tingkat lokal yang dianut di Indonesia. Pemilukada langsung dilaksanakan semenjak Juni 2005 lalu, sebagai pengganti sistem pemilihan kepala daerah yang pernah dilaksanakan di Indonesia selama 32 tahun lebih.

Menurut Mendagri M. Ma'ruf, ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan Pemilukada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu;

1. Pemilukada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan bahkan pemilihan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
2. Pemilukada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945.
3. Pemilukada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat.
4. Pemilukada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah.

5. Pemilukada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. (Mubarok, 2005)²⁸

Selanjutnya, Prihatmoko mengemukakan bahwa Pilkada langsung adalah Pemilihan Kepala Daerah yang melibatkan, mendorong dan membuka akses partisipasi seluruh warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan terbuka kemungkinan sebagai calon, serta pengawal proses pelaksanaan. Dalam Pemilukada langsung kesempatan masyarakat untuk ikut menjadi peserta atau sebagai pemilih terbuka lebar. Tidak hanya itu, dalam Pemilukada langsung masyarakat juga harus mendapat akses yang luas untuk ikut mengawasi jalannya proses Pemilukada langsung. (Prihatmoko, 2005)²⁹

Pemilukada secara langsung merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat serta pembelajaran demokrasi bagi rakyat di daerah dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 yang revisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan Kepala Daerah secara langsung diawali dengan suatu proses rekrutmen di tingkat partai politik dan kemudian partai politik atau gabungan partai politik akan mendaftarkan pasangan calon yang telah ditetapkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota. Setelah calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan oleh KPU Kab/Kota, sesuai jadwal yang

²⁸ Mubarok, Mufti. *Sukses Pilkada*. Java Pustaka Media Utama, Surabaya. 2005

²⁹ Prihatmoko, Joko J. *op.cit*,

telah ditetapkan baru proses seleksi calon pemimpin daerah yang sebenarnya dilakukan secara langsung oleh masyarakat yakni pemilih yang telah mempunyai hak pilih. Artinya pada saat pemilihan kepala daerah secara langsung, masyarakat yang telah memiliki hak pilih akan memilih calon-calon pilihan yang telah melalui suatu proses rekrutmen di tingkat partai politik.



BAB III

METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan metode penelitian, penulis terlebih dahulu membahas lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian, unit analisis, teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data, dan terakhir analisis data.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat. Alasan pemilihan lokasi ini adalah bahwa :

1. Dari 15 Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Pemilukada di Sumatera Barat, di Kabupaten Pasaman Barat ada calon kepala daerah yang mendaftar sendiri ke KPUD. Ini menyiratkan bahwa telah terjadi suatu persoalan dalam proses rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik dan apa yang terjadi tersebut tidak dapat diakses oleh masyarakat. Sementara dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah dijelaskan bahwa proses rekrutmen harus dilakukan secara demokratis dan transparan.
2. Di Pasaman Barat ada permasalahan dalam proses rekrutmen yang melibatkan pihak kepolisian, pasangan calon menggugat partai politik secara hukum dengan tuduhan pencemaran nama baik.
3. Pemilihan lokasi juga didasarkan pada kedekatan lokasi dengan tempat tinggal peneliti serta agar lebih memudahkan baik dari segi waktu maupun biaya.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian seperti yang telah diuraikan di atas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Selanjutnya, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melakukan pemahaman yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu dengan menjelaskan fenomena sosial tersebut berdasarkan gejala-gejalanya.³⁰

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³¹

Kirk dan Miller, mendefenisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang fundamental bergantung kepada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.³²

Metode Kualitatif digunakan menurut Moleong, karena pertimbangan antara lain; pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³³

³⁰ Singarimbun Masri. *Metode Penelitian Survei*. 1989

³¹ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1996, hal. 3

³² *Ibid*, hal. 3

³³ *Ibid*. hal. 5

Disamping itu, penelitian deskriptif, menurut Widodo penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.³⁴ Sementara Irawan mengemukakan, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya.³⁵ Sementara, Arikunto, mengatakan, bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian.³⁶

Pada penelitian ini penulis mengacu kepada definisi yang dikemukakan, Irawan, karena analisis proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik, bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya.

C. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga atau institusi. Lembaga yang menjadi unit analisis yaitu Partai Politik yang mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Pasaman Barat. Alasan pemilihan lembaga sebagai unit analisis adalah karena rekrutmen dilakukan oleh suatu lembaga yakni partai politik.

³⁴ Widodo, Erna dan Mukthar, *Kontruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Yokyakarta, 2000, Avyrouz hal :15

³⁵ Irawan, Prastya, *Logika dan Prosedur Penelitian*, STIA-LAN, Jakarta, 1999, hal:60

³⁶ Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal: 68

D. Teknik Pemilihan informan

Menurut Spradley dalam Afrizal, informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti. Selanjutnya, Afrizal, membagi dua cara memilih informan yakni *Purposive* dan *snowballing*. Teknik *Purposive* adalah para informan dicari berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dan peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan dan keberadaan mereka diketahui oleh peneliti. Sementara teknik bola salju (*snowballing*) adalah pencarian informan-informan penelitian apabila peneliti tidak mengetahui siapa saja yang dapat diwawancarai untuk mendapatkan informasi. Orang-orang yang perlu diwawancarai adalah mereka yang mengetahui isu yang sedang diteliti atau melakukan sesuatu yang ingin diketahui oleh peneliti. Cara mendapatkan informan adalah dari informan yang lain atau dari dokumen.³⁷

Pada teknik *purposive*, informan diambil sesuai dengan tujuan penelitian, penarikan jumlah atau ukuran informan tidak dipersoalkan, dan unit informan yang dihubungi disesuaikan dengan standar tertentu. Namun sebelum melakukan penarikan informan peneliti perlu mengklasifikasikan informan sesuai dengan peranannya. Informan diambil sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap klas/standar informan. Berbeda dengan *purposive*, penarikan informan dengan teknik *snowball* merupakan penarikan informan yang dilakukan secara maraton. Artinya peneliti menentukan orang pertama yang akan dijadikan unit informan. Informan berikutnya dipilih berdasarkan rekomendasi orang pertama. Orang-orang yang ditujuk tersebut selanjutnya diminta menunjuk orang lain yang memenuhi standar untuk menjadi

³⁷ Afrizal, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: dari pengertian sampai penulisan laporan*. Laboratorium Sosiologi Fisip Unand. Padang. 2005, hal. 66

anggota informan. Hal ini dilakukan terus menerus sampai jumlah informan yang diinginkan terpenuhi dan data yang diperlukan diperoleh.

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling (penarikan informan secara sengaja), artinya informan yang dipilih ditentukan standarnya oleh peneliti. standar informan dalam penelitian ini meliputi; pengurus atau pimpinan partai politik atau gabungan partai politik, terlibat dalam proses rekrutmen calon, terlibat dalam pengambilan keputusan penetapan calon, dan berpengaruh terhadap proses rekrutmen dan penetapan calon, termasuk para calon yang mendaftar ke partai politik atau gabungan partai politik.

Informan dari Partai Politik (pengurus) diharapkan dapat memberikan keterangan atau informasi tentang proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, bagaimana proses rekrutmen dilakukan dan standar yang ditetapkan, serta faktor apa saja yang mempengaruhi proses rekrutmen tersebut. Informan dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diharapkan dapat memberikan informasi tentang proses yang harus dijalani serta persyaratan apa yang harus dipenuhi dalam proses seleksi tersebut.

Di Kab Pasaman Barat terdapat partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan empat pasangan calon ke KPUD. Maka informan yang diambil dalam penelitian ini adalah pengurus partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendaftar ke partai politik atau gabungan partai politik tersebut, Sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3 : Daftar Jumlah Informan.

No	INFORMAN	JUMLAH
1.	Pengurus Partai Politik	9 Orang
2.	Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang
	Jumlah	15 Orang

Jumlah informan yang diambil sebanyak 15 orang yang terdiri dari pengurus partai politik 9 orang yaitu pimpinan Partai PPP, pimpinan Partai Demokrat, pimpinan Partai Hanura, pimpinan Partai PPRN, pimpinan Partai PAN, pimpinan Partai PKS, pimpinan Partai Gerindra, pimpinan Partai PBR, pimpinan Partai PKB dan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang mendaftar ke partai politik sebanyak 6 orang yaitu H Baharuddin R, H.Syahiran, Episantoso, H.Risnawanto, H.Syahrul Dt Marajo, Asgul. Kemudian ada informan pendukung sebanyak 2 orang sebagai sumber Triangulasi data yakni dari KPUD 1 orang dan dari Panwas Pemilukada 1 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan penelitian tentang proses rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik dan gabungan partai politik meliputi bagaimana proses seleksi dilakukan, apa standar yang ditetapkan, bagaimana standar itu ditetapkan, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh calon, bagaimana proses penetapan calon, dan faktor apa saja yang mempengaruhi proses

penetapan calon tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab melalui teknik wawancara dan pengumpulan dokumen.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dimaksudkan untuk menggali secara mendalam bagaimana proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik dan gabungan partai politik serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen tersebut. Menurut Meleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁸

Riyanto mengemukakan, definisi lain, bahwa wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan informan (Riyanto,). Selanjutnya, Narbuko dan Achmadi mengatakan, bahwa wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau ketereangan-keterangan.

Sementara itu, Afrizal, mengemukakan, dua konsep tentang wawancara, pertama, wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada para informan dan informan

³⁸ Moleong, Lexy J.*op.cit*, hal 135

menjawab pertanyaan menurut apa yang mereka inginkan. Kedua, adalah wawancara mendalam (in-depth interview).³⁹

Yang dimaksud dengan wawancara mendalam menurut Taylor adalah sebuah wawancara tidak berstruktur antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang. Berulang-ulang tidaklah berarti mengulangi pertanyaan yang sama akan tetapi menanyakan hal-hal yang berbeda dan mengklasifikasi informasi-informasi yang sudah didapat sebelumnya.⁴⁰

Menurut Lincoln dan Guba (1985) wawancara mendalam adalah mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain yang kemudian dikembangkan oleh peneliti.⁴¹

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan pimpinan partai politik dan gabungan partai politik serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat.

2. Pengumpulan Data Dokumentasi

Untuk mendukung wawancara mendalam dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik dokumen digunakan dengan alasan sebagaimana dikemukakan, Guba dan Lincoln (1981) dalam Moleong, sebagai berikut:

³⁹ Afrizal .*op.cit* hal. 69

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 69

⁴¹ Moleong, Lexy J.*op.cit*, hal. 135

1. Dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.
2. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian
3. Karena sifatnya alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
4. Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan teknik kajian isi.
5. Hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Dokumen dikumpulkan dan diamati sehingga dapat dilakukan cek terhadap kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dari wawancara. Menurut Afrizal (2005), bukti-bukti tertulis tentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu, seperti janji-janji, peraturan-peraturan, realisasi sesuatu atau respon pemerintah atau perusahaan terhadap sesuatu.⁴²

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi berupa petunjuk teknis rekrutmen calon kepala daerah dari masing-masing partai politik dan gabungan partai politik, berita acara proses penetapan calon oleh partai politik, dan berkas pencalonan (Surat pendaftaran, riwayat hidup calon, dan jumlah calon yang mendaftar ke masing-masing partai politik).

F. Analisis Data dan Pemeriksaan Keabsahan Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Menurut Moleong, analisis data berarti salah

⁴² Afrizal. *op.cit*, hal. 16

satu langkah dalam penelitian yang dilakukan untuk mengorganisasikan data yang diperoleh yang mencakup, mengatur, mengurut, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya sehingga dapat dicari pola-pola hubungan antara data-data itu. Selanjutnya, analisis data menurut Meleong adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.⁴³

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan, Bogdan dan Taylor, mendefenisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.⁴⁴

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah suatu proses mengorganisasikan, dan mengurutkan data berdasarkan bagian-bagian, kategori dan antara bagian dengan keseluruhannya. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik analisis triangulasi. Sebagaimana dikemukakan Meleong, teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁴⁵

Sementara itu, Afrizal menyebutkan teknik analisis data triangulasi adalah informasi dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias kelompok.

⁴³ Moleong, Lexy J. *op.cit*, hal. 103

⁴⁴ *Ibid.* hal. 103

⁴⁵ *Ibid.* hal. 178

Trianggulasi dapat berarti adanya informan-informan yang berbeda atau adanya sumber data berbeda.⁴⁶

Menurut Denzin, empat macam teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data yakni dengan menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori.⁴⁷. Teknik triangulasi yang dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan menggunakan sumber. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.

G. Proses Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan proses pelaksanaan penelitian yang terjadi di lapangan, mulai dari pemilihan informan, pelaksanaan wawancara mendalam, pengumpulan data dokumentasi. Selain itu, juga dilengkapi dengan bagaimana peneliti melakukan analisis dan menguji keabsahan data dan terakhir kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian.

1. Pemilihan Informan

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mencari jawaban tentang pertanyaan, bagaimana proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik. Maka informan utama yang dipilih peneliti adalah pengurus partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010.

⁴⁶ Afrizal, *op.cit* hal. 62

⁴⁷ Moleong, Lexy J. *op.cit*, hal. 178

Untuk memperkaya data serta sebagai pembanding data, informan juga dipilih dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendaftar ke partai politik atau gabungan partai politik maupun yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, *pertama*, penjangkauan kepada informan tentang kesediaan dirinya untuk diwawancarai dan membuat perjanjian tentang waktu dan tempat wawancara. Pada tahap ini penulis melaksanakannya dengan cara menghubungi informan melalui kontak telepon. *Kedua*, pelaksanaan wawancara, wawancara dengan informan dilakukan ditempat yang telah disepakati sebelumnya, ada yang dilakukan di rumah dan ada di kantor informan. Waktu pelaksanaan wawancara diselenggarakan pada sore dan malam hari serta pada hari libur, hal ini dilakukan karena seluruh informan memiliki kesibukan dan tugas masing-masing. Lama wawancara dilakukan bervariasi yakni berkisar antara satu sampai dua jam sesuai dengan tujuannya karena selain wawancara untuk mengumpulkan data juga ada wawancara lebih menfokuskan untuk mengkonfirmasi data yang ada.

Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan materi pokok serta maksud dan kegunaan data dikumpulkan. Karena suara informan akan direkam dengan *tape recordér/hand phone*, maka sebelumnya juga diminta kesediaannya untuk direkam. Berdasarkan

penjelasan peneliti seluruh informan bersedia suaranya untuk direkam selama wawancara berjalan.

3. Pengumpulan Data Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi dilakukan untuk mendukung data hasil wawancara, selain itu dari pengumpulan data dokumentasi juga ditemukan fakta baru. Data dokumentasi diperoleh di masing-masing partai politik dan gabungan partai politik, disamping itu data dokumentasi juga diperoleh di KPUD. Data dokumentasi yang diambil berupa peraturan masing-masing partai atau gabungan partai dalam proses rekrutmen, berita acara penetapan calon, surat pencalonan serta data masing-masing calon yang diajukan ke KPUD. Dokumen diperoleh dengan sistem meminjam kepada instansi bersangkutan dan menfoto copy, bagian-bagian yang dianggap perlu.

4. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data tersebut. Untuk keperluan perlu pengecekan atau pembandingan data tersebut.

Dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data telah ada.

Jika peneliti melakukan pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Triangulasi data dibedakan atas triangulasi teknik dan triangulasi sumber, dimana triangulasi teknik berarti peneliti melakukan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, sedangkan triangulasi sumber adalah dengan mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan teknik yang sama.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi untuk beberapa sumber data yang sama secara bersama. Peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi resiko keterbatasan kesimpulan pada metode dan data tertentu saja serta untuk meningkatkan validitas data yang diperoleh dalam penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang tepat berdasarkan data yang di dapatkan.

Adapun yang menjadi triangulasi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010
2. Panwas Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pasaman Barat mempunyai luas wilayah $\pm 3.887,77 \text{ km}^2$. Dengan 11 Kecamatan yang terdiri dari 19 Nagari yang memanjang dari utara sampai selatan. Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 333.192 jiwa⁴⁸.

Tabel 4: Jumlah Kecamatan, Nagari dan jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Penduduk
1	Sungai Beremas	1	20.536
2	Ranah Batahan	2	21.862
3	Koto Balingka	1	23.555
4	Sungai Aua	1	28.716
5	Lembah Melintang	1	38.988
6	Gunung Tuleh	2	25.760
7	Talamau	3	19.689
8	Pasaman	3	53.690
9	Luhak Nan Duo	2	33.987
10	Sasak Ranah Pasisie	1	12.990
11	Kinali	2	53.419
JUMLAH		19	333.192

Sumber: Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat

Dari 333.192 jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat, $\pm 63,5\%$ diantaranya adalah penduduk yang sudah mempunyai hak pilih yang meliputi; berusia di atas 17 tahun, sudah/pernah menikah, dan bukan TNI/POLRI, sehingga

⁴⁸ Data diperoleh dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Pasbar

jumlah pemilih Kabupaten Pasaman Barat adalah sebanyak 238.295 pemilih. Jumlah pemilih tersebut tersebar di 11 Kecamatan, 19 PPS dan 900 TPS⁴⁹.

Tabel 5: Jumlah Kecamatan, Jumlah PPS dan jumlah Pemilih Kabupaten Pasaman Barat

No.	Nama Kecamatan	Jumlah PPS	Jumlah Pemilih
1	Sungai Beremas	1	14.147
2	Ranah Batahan	2	14.667
3	Koto Balingka	1	16.603
4	Sungai Aua	1	19.879
5	Lembah Melintang	1	25.824
6	Gunung Tuleh	2	13.538
7	Talamau	3	18.836
8	Pasaman	3	40.496
9	Luhak Nan Duo	2	25.870
10	Sasak Ranah Pasisie	1	9.401
11	Kinali	2	39.034
JUMLAH		19	238.295

Sumber: Dokumen Daftar PPS dan Pemilih KPU Kabupaten Pasaman Barat

B. Partai Politik

1. Partai Politik Peserta Pemilu 2009

Partai politik yang mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009 di Kabupaten Pasaman Barat adalah sebanyak 29 partai politik dari 38 partai yang dinyatakan sebagai peserta Pemilu. Daftar partai politik peserta pemilu 2009 di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel 6:

⁴⁹ Data berdasarkan dokumen daftar pemilih Pilkada KPU Kab.Pasaman Barat

Tabel 6: Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2009

No	No Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	%
1	1	Partai Hanura	7.170	5,6
2	2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.886	1,4
3	3	PPPI	246	0,2
4	4	PPRN	3.520	2,5
5	5	Partai Gerindra	2.009	1,4
6	6	Partai Barisan Nasional	940	0,7
7	7	PKPI	1.483	1,1
8	8	PKS	6.776	4,9
9	9	PAN	14.503	10,4
10	10	PIIB	757	0,5
11	11	Partai Keadaulatan	232	0,2
12	12	PPD	-	
13	13	PKB	4.378	3,1
14	14	PPI	1.349	1,0
15	15	PNI Marhaenisme	-	
16	16	PDP	708	0,5
17	17	Partai Karya Perjuangan	729	0,5
18	18	PMB	2.977	2,1
19	19	PPDI	2.174	1,6
20	20	PDK	2.835	2,0
21	21	Partai Republika Nusantara	2.868	2,1
22	22	Partai Pelopor	3.258	2,3
23	23	Partai Golkar	16.893	12,1
24	24	PPP	13.179	9,5
25	25	PDS	204	0,1
26	26	PNBKI	-	
27	27	PBB	6.077	4,4
28	28	PDIP	15.208	10,9
29	29	PBR	5.283	3,8
30	30	Partai Patriot	1.658	1,2
31	31	Partai Demokrat	18.227	13,1
32	32	PKDI	-	
33	33	PIS	-	
34	34	PKNU	-	
35	40	Partai Merdeka	-	
36	41	PPNUI	-	
37	42	PSI	-	
38	44	Partai Buruh	1.560	1,1
		Jumlah	139.087	100%

Sumber: Dokumen KPU Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010

2. Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2009, hanya 12 Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Partai Demokrat meraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebesar 18.227 suara dari 139.087 suara sah atau 13,1% dengan perolehan suara tersebut partai demokrat berhasil meraup kursi 5 dari 35 kursi. Urutan kedua Partai berlambang pohon beringin berhasil memperoleh suara 16.893 dari 139.087 atau 12,1 % dengan meraup 5 dari 35 kursi yang ada di DPRD Pasaman Barat. Urutan ketiga diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan suara sebanyak 15.208 suara dari 139.087 jumlah suara sah atau 10,9 persen, dengan demikian PDIP memperoleh 5 kursi di DPRD. Sedangkan urutan keempat disusul oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang memperoleh suara sebanyak 13.179 atau 9,5 % dengan meraup 5 kursi, Partai Amanat Nasional memperoleh suara 14.503 atau 10,4 Kursi, dan urutan keenam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan 3 Kursi di DPRD.⁵⁰ Selengkapnya perolehan kursi Partai Politik dapat dilihat pada tabel 7:

⁵⁰ Dokumen Berita Acara penghitungan suara Pemilihan Umum Legislatif 2009

Tabel. 7. Urutan Ranking Perolehan kursi Partai Politik Untuk DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilu 2009

No	Nomor urut dan Nama Parpol	Jumlah Perolehan Kursi	Presentase perolehan suara (%)
1.	Hanura	2	5,7%
2	PPRN	1	2,8%
3	PAN	4	11,4%
4	Golkar	5	14,3%
5	PPP	5	14,3%
6	PBB	2	5,7%
7	PDIP	5	14,3%
8	PKS	3	8,6%
9	PKB	1	2,8%
10	PBR	1	2,8%
11	Demokrat	5	14,3%
12	Peloppor	1	2,8%
	Jumlah	35	100%

Sumber: Dokumen Pemilu Legislatif KPU Pasaman Barat, tahun 2009

Dari tabel 7 diatas, dapat dilihat bahwa gabungan partai PAN dan PKS memperoleh kursi di atas 15% dari akumulasi kursi sehingga kedua partai tersebut dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus bergabung dengan partai lain. Sedangkan Partai Golkar perolehan suaranya tidak mencukupi 15 % dari akumulasi perolehan kursi sehingga harus bergabung untuk dapat mengajukan pasangan calon. Partai PDIP perolehan suaranya juga tidak mencukupi 15 % dari akumulasi perolehan kursi sehingga harus bergabung untuk dapat mengajukan pasangan calon. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

perolehan suaranya Juga tidak mencukupi 15 % dari akumulasi perolehan kursi sehingga harus bergabung untuk dapat mengajukan pasangan calon.

3. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon

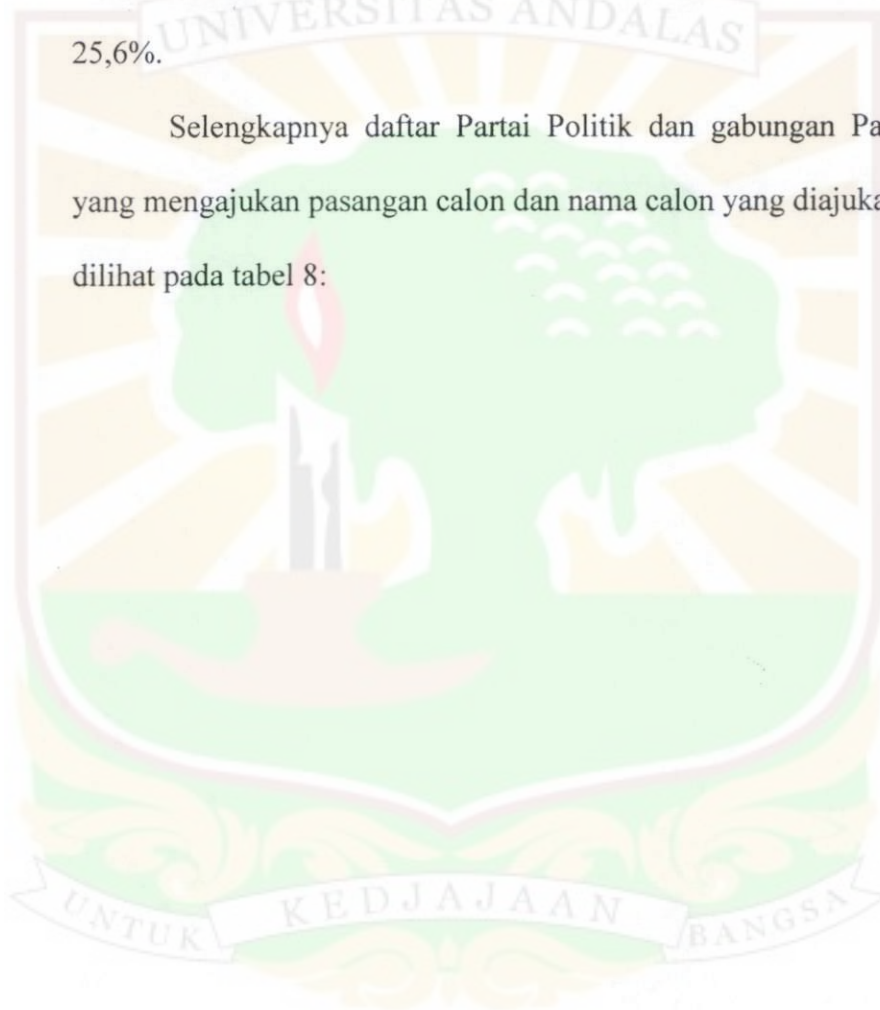
Sesuai dengan UU Nomor: 32 tahun 2004, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mencalonkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, apabila memenuhi persyaratan perolehan kursi sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.⁵¹

Berdasarkan perolehan kursi di DPRD maupun menurut akumulasi perolehan suara sah sebagaimana diuraikan diatas, tidak ada Partai Politik yang dapat mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala tanpa harus bergabung dengan partai politik lain. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perolehan suaranya Juga tidak mencukupi 15 % dari akumulasi perolehan kursi sehingga harus bergabung untuk dapat mengajukan pasangan calon dengan membentuk koalisi yaitu : Partai Koalisi Bangkit Bersama (PPP, Partai Demokrat, Partai Hanura, P.Pelopop, Gerindra, PMB, P.Kedaulatan, PPPI, PPI, P.Buruh, PDK) dengan akumulasi perolehan suara 38,5% dari total suara sah pemilu tahun 2009.

⁵¹ Lihat pasal 59 UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

PKS dan PAN mencalonkan kepala daerah tanpa bergabung dengan partai lain. Sementara Partai Gokar berkoalisi dengan, PKB,PPDI,Pakar Pangan, P.Republikan, dan P Patriot dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan persentase suara sah 20,6% atau 17,1 % akumulasi kursi di DPRD. Partai PDI-P berkoalisi dengan PBB,PPRN, PBR dengan jumlah kursi 9 di DPRD akumulasi 25,6%.

Selengkapnya daftar Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang mengajukan pasangan calon dan nama calon yang diajukannya dapat dilihat pada tabel 8:



Tabel. 8. Daftar Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu pada Pasaman Barat tahun 2010 sebelum diverifikasi oleh KPU Kab.Pasbar.

Nama Parpol atau Gabungan Parpol	Calon yang diajukan	
	Calon Kepala Daerah	Calon Wakil Kepala Daerah
Partai Koalisi Bangkit Bersama (PPP, Partai Demokrat, Partai Hanura, PPRN, PBB, PBR, P.Pelopor, Gerindra, PMB, P.Kedaulatan, PDP, PPPI, PPI, PKPB, P.Buruh, PDK, PKPI dan P.Barnas)	H. Baharuddin R. MM	H. Syahrul Dt. Marajo.
Partai Koalisi (PDI-P,PBB,PPRN, PBR)	H. Risnawanto	H. Nofrizal
Partai Koalisi (P.Gokar, PKB,PPDI,Pakar Pangan, P.Republikan, ,PIIB, PPDIB dan P Patriot Pancasila)	H. Syahiran	Asgul
Partai Koalisi (PAN dan PKS)	H. Akmaluddin Batubara	Epi Santoso
Calon Perseorangan	Bahder Johan Nasution,	Nazar Ihkwan
Calon Perseorangan	H. M.Saripadarangkuti	H. Zulkifli

Sumber: Laporan Pemilu pada KPU Kab.Pasaman Barat 2010

Dari empat pasangan calon yang didaftarkan oleh gabungan partai politik, keempatnya memenuhi syarat 15 % dari suara sah atau 15 % dari total kursi DPRD hasil Pemilu tahun 2009 meskipun ada partai politik yang tidak memenuhi syarat atau keluar dari koalisi dan dua pasang calon perseorangan hasil verifikasi KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak memenuhi syarat dan tidak lolos sebagai calon atau kandidat, dapat dilihat dalam tabel 9 :

Tabel. 9. Daftar Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu pada Pasaman Barat tahun 2010 setelah diverifikasi oleh KPU Kab.Pasbar.

Nama Parpol atau Gabungan Parpol	Calon yang diajukan	
	Calon Kepala Daerah	Calon Wakil Kepala Daerah
Partai Koalisi Bangkit Bersama (PPP, Partai Demokrat, Partai Hanura, P.Pelopor, Gerindra, PMB, P.Kedaulatan, PPPI, PPI, P.Buruh, PDK)	H. Baharuddin R.	H. Syahrul Dt. Marajo
Partai Koalisi (PDI-P, PBB, PPRN, PBR, PKPI)	H. Risnawanto	H. Nofrizal
Partai Koalisi (P.Gokar, PKB, PPDI, Pakar Pangan, P.Republikan, dan P Patriot)	. Syahiran	Asgul
Partai Koalisi (PAN dan PKS)	H. Akmaluddin Batubara	Epi Santoso

Sumber: Laporan Pemilu KPU Kab.Pasaman Barat 2010 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasbar Tahun 2010.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik

Berdasarkan hasil penelitian, proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik dan gabungan partai politik pada Pilkada tahun 2010 di Pasaman Barat ada yang dilakukan secara formal dan ada secara informal. Secara formal proses rekrutmen tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan yang dimulai dengan tahap persiapan, tahap penjaringan, tahap penyaringan/seleksi, dan tahap penetapan calon yang akan diajukan ke KPUD.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, masing-masing partai politik melakukan beberapa kegiatan diantaranya melakukan penjajakan untuk berkoalisi dengan partai politik lain karena tidak ada partai politik yang memenuhi kuota 15 % perolehan kursi atau 15% perolehan suara sah pada Pemilu 2009. selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun peraturan atau tata tertib tentang proses rekrutmen yang akan dilakukan.

a. Penjajakan Koalisi

Masing-masing partai mulai dengan menghitung akumulasi perolehan kursi ataupun akumulasi perolehan suara pada pemilu 2009. berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, partai politik yang berhak

mengajukan pasangan calon adalah yang telah memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi di DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.⁵² Bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon, maka partai politik akan melakukan penjajakan terhadap partai politik lain untuk melakukan koalisi hingga memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan pasangan calon.

PKS, dan PAN sepakat untuk berkoalisi dalam mengajukan pasangan calon, kesepakatan diperoleh tidak hanya karena untuk memenuhi syarat perolehan kursi atau suara, tetapi juga karena adanya kesamaan ideologi dari kedua partai politik tersebut yakni sama-sama berideologi Islam.

*"Kami sepakat berkoalisi, disamping dari dua partai tersebut sama-sama ideologinya Islam juga karena kami juga sama-sama menjagokan calon yang sama, Wakil dari kami dan Cabup dari PAN, jadi klop aja."*⁵³

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, dapat dilihat bahwa ternyata dalam proses rekrutmen pada dasarnya tahapan yang dilakukan hanyalah formalitas belaka, sebelum tahapan itu dimulai masing-masing partai politik dan gabungan partai politik sudah mempunyai sosok calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diajukan ke KPU.

Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Pelopor, Partai Gerindra, PMB, Partai Kedaulatan, PPPI, PPI,

⁵² Lihat Pasal 59 ayat 2 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁵³ Wawancara dengan Ketua PKS Pasbar Kamis jam 16.00 WIB tgl 10 Feb 2011.

Partai Buruh, PDK dengan akumulasi perolehan suara 38,5% dari total suara sah pemilu tahun 2009, sepakat untuk bergabung dalam bentuk Koalisi Bangkit Bersama karena masing-masing mempunyai keinginan dan semangat yang sama untuk bangkit bersama-sama dalam mendukung pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik yang mempunyai perolehan kursi maupun yang tidak ada kursi di DPRD. Dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan musyawarah karena masing-masing partai mempunyai hak suara.

*"Kami yang terdiri dari tujuh partai gurem dan empat partai yang mempunyai kursi berkoalisi untuk mendukung calon bupati Baharuddin dan Wakil Bupati H.Syahrul Saya dipercaya sebagai ketua diantara partai Gurem, kalau PPP tanpa berkoalisi dengan Partai lain tidak ada artinya.."*⁵⁴

Sementara partai PKS dan PAN masing-masing dapat mengajukan pasangan calon karena memenuhi kuota baik perolehan kursi maupun perolehan suara sehingga tidak perlu bergabung dengan partai politik lain. Selanjutnya khusus bagi partai yang tidak memiliki kursi di DPRD juga bergabung membentuk satu koalisi yakni *Koalisi bangkit bersama* yang terdiri dari 12 partai politik. Koalisi dibentuk juga untuk memenuhi syarat perolehan suara untuk dapat mengajukan pasangan calon pada Pemilu pada 2010, di samping itu koalisi juga dilakukan karena sama visi dan misi untuk membangun Pasaman Barat diatas tadah agama.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Ketua Koalisi *bangkit bersama Asmu'i Toha*, Sabtu, 12 February 2011 di Simpang Empat Pasbar.

⁵⁵ Wawancara dengan Ketua Koalisi Pasaman Barat *bangkit bersama Asmu'i toha* Sabtu 12 February 2011 Di Simpang Empat Pasbar.

Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa partai politik melakukan koalisi untuk mengajukan pasangan calon disebabkan karena tidak mencukupi kuota baik perolehan kursi maupun suara pada Pemilu 2009 sehingga harus berkoalisi dengan partai lain. Koalisi dilakukan bukan karena kesamaan pandangan dan visi untuk melahirkan seorang pemimpin yang demokratis, kuat dan efektif seperti yang diharapkan, tetapi koalisi dilakukan hanya karena kebutuhan sesaat, agar dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Meskipun secara umum terlihat partai yang berkoalisi sudah terbentuk berdasarkan ideologi yang sama, namun dari informan diperoleh informasi bahwa koalisi yang dilakukan merupakan kebutuhan untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

b. Penyusunan Peraturan Rekrutmen

Sebelum melakukan rekrutmen terhadap bakal calon yang akan diajukan ke KPUD, masing-masing partai politik dan gabungan partai politik terlebih dahulu menyusun peraturan, tata tertib atau mekanisme pemilihan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bagi partai yang besar mempunyai juklak yang sudah diatur dan disetujui mulai dari DPP, DPW dan DPD masing-masing partai. Sementara bagi partai yang berkoalisi, pelaksanaan rekrutmen diatur dengan suatu tata tertib yang disusun berdasarkan kesepakatan dari masing-masing partai yang berkoalisi.

2. Tahap Penjaringan

Setelah peraturan atau tata tertib pemilihan terbentuk, masing-masing partai mulai menyusun strategi untuk menjaring bakal calon yang akan diajukan ke KPUD. Partai mulai melirik calon-calon yang layak untuk diajukan. Dalam hal ini terjadi semacam lobi-lobi antara partai dan gabungan partai dengan bakal calon. Dengan demikian, baik partai politik maupun calon sudah melakukan sebetulnya pendekatan informal sebelum proses pendaftaran dimulai secara resmi.

Zulkenedi mengungkapkan bahwa dia ditawarkan oleh partai politik untuk maju sebagai calon.⁵⁶

"Saya pribadi ditawarkan oleh partai, waktu itu sebenarnya belum menentukan pasangan, cuma menawarkan mau menjadi calon kepala daerah dari partai yang bersangkutan, siapa pasangannya dia nanti yang menentukan." Katanya.

Pendekatan tidak hanya dilakukan oleh partai atau gabungan partai, tetapi calon juga melakukan pendekatan terhadap partai-partai atau gabungan partai yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Syahiran, mengungkapkan bahwa,

*"yang saya lalui pada dasarnya kita juga yang mendekati partai karena kita bukan anggota partai, kalau seseorang sudah anggota partai sebelumnya, barangkali tidak sulit untuk melakukan pendekatan karena memang sudah kadernya sendiri, sedangkan kita termasuk yang dilirik atau yang melirik, yang saya rasakan kemaren dia melirik kita dan kita melirik partai jadi saling lirik, hanya saja tentu kita yang lebih aktif melirik partai karena partai bisa saja jual mahal kan."*⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan mantan calon wakil kepala daerah

⁵⁷ Wawancara dengan mantan calon kepala daerah Syahiran, Selasa 15 Februari 2011 di simpang Empat.

Setelah ada pendekatan antara partai dengan calon, baru kemudian partai mengundang calon untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan mekanisme dan tata tertib yang diatur dalam proses rekrutmen.

Pada tahap ini sebenarnya telah memperlihatkan bahwa pada dasarnya tidak ada tahapan yang dilakukan, partai hanya mencari orang-orang yang dianggap mau maju sebagai calon kepala daerah kemudian melakukan penawaran-penawaran dengan calon, baru kemudian calon diminta untuk melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan. Tahapan hanyalah formalitas.

a. Pengumuman dan Pengambilan Formulir

Pada tahap ini, secara resmi masing-masing partai mulai membuka pendaftaran yang diawali dengan pengumuman pendaftaran melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik. Lama pengumuman berkisar antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari. Bagi warga masyarakat yang merasa mampu dan ingin maju sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mengambil formulir di masing-masing partai politik dan gabungan partai politik. Calon yang mengambil formulir dapat langsung secara berpasangan maupun sendiri-sendiri. Daftar calon yang mengambil formulir di partai politik dapat dilihat dalam tabel 10 :

Tabel. 10. Data calon yang mengambil formulir di Partai politik dan gabungan partai politik.

Parpol/Gabungan Parpol	Calon / Pasangan calon yang mengambil formulir
Golkar	<ol style="list-style-type: none"> 1. H.Syahiran 2. H.Baharuddin R 3. H.Zamri 4. Zulkenedi Said
PAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. H.Zamri 2. H.Akmal BB 3. H.Syahiran 4. Suhardi Hsb
PPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. H.Baharuddin R 2. Sudirman Samin
Partai Demokrat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eni Kamal 2. H.Zamri 3. H.Akmal BB 4. H.Syahiran 3. H.Baharuddin R 5. Yulianto
PKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Epi Santoso 2. Zamri 3. H.Akmal BB 4. H.Syahiran 5. H.Baharuddin R 6. Suhardi hsb 7. Azwir
PDIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. H.Risnawanto 2. Syamsul Bahri
Partai Hanura	<ol style="list-style-type: none"> 1. H.Syahrul Dt.Marajo 2. H.Baharuddin R

Sumber: Hasil Penelitian di masing-masing partai politik dan gabungan partai politik

Dilihat dari daftar calon yang mengambil formulir ke masing-masing partai politik dan gabungan partai politik sebagaimana dalam tabel 7, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengambil formulir adalah calon yang sama, artinya setiap calon mengambil formulir di setiap partai politik atau gabungan partai politik. Calon yang mengambil formulir di partai Golkar juga mengambil formulir di partai lain begitu juga dengan calon yang mengambil formulir di PAN juga mengambil formulir di partai yang lain pula.

Sementara Partai gurem yang berkoalisi (Gerindra, PMB, P.Kedaulatan, PDP, PPPI, PPI, PKPB, P.Buruh, PDK) mendatangi Calon yang akan maju dan menawarkan Partai Gurem tersebut. Kata Ketua koalisi partai gurem Asmu'I Toha bahwa pertama-tama kami mendatangi Syahiran (Incamben) dan dia setuju, tetapi setelah itu dia tidak bias memegang komitmen dan kami datang menawarkan partai kepada Baharuddin R ternyata disambut baik, kami sepakati untuk mendukung beliau karna kami anggap bisa memegang komitmen dengan parati kami. Selanjutnya kami minta persetujuan kepada DPW dan DPP dan akhirnya disetujui.

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mengambil formulir ke masing-masing partai yang mempunyai kursi di DPRD sebelum berkoalisi. Nama-nama calon yang mengambil formulir dapat dilihat pada tabel 8.

Sebagaimana yang terjadi di partai Golkar, PKS, Demokrat, PPP dan Hanura, calon yang mengambil formulir di masing-masing partai yang

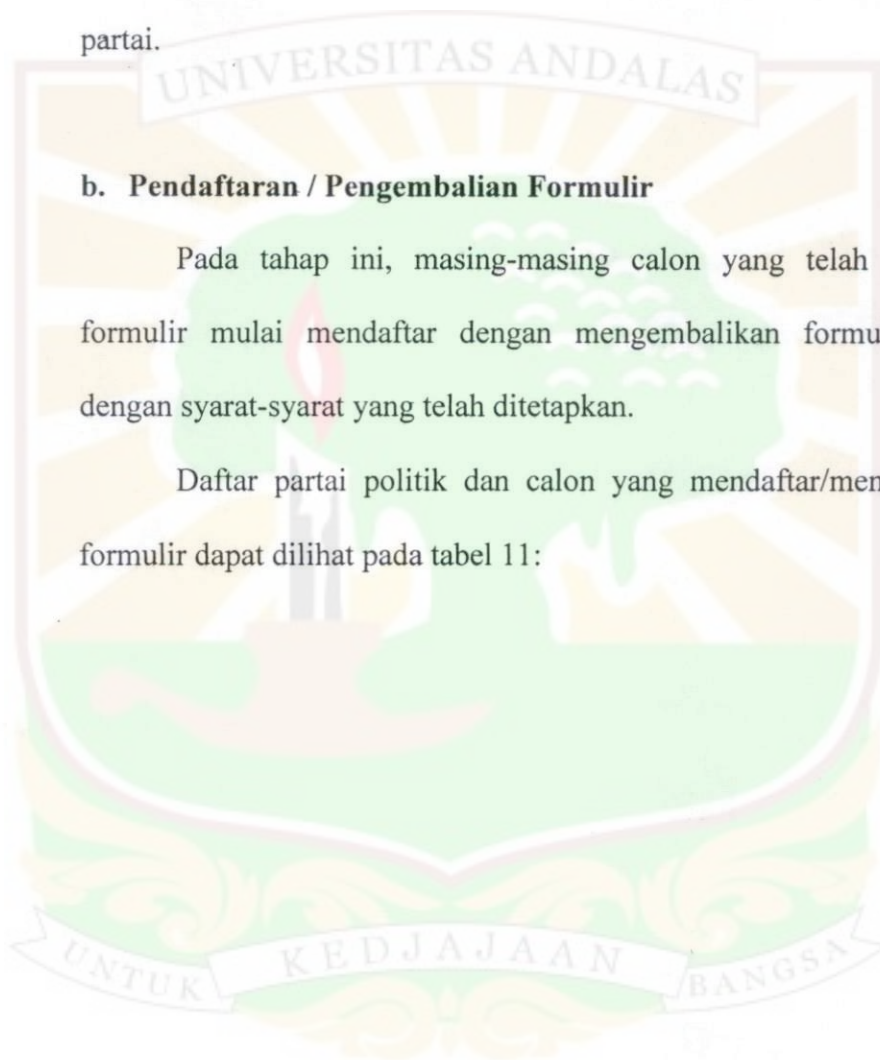
tersebut juga orang yang sama. Baharuddin R yang diusung Koalisi Bangkit Bersama, ternyata disamping mengambil formulir di PPP, juga mengambil formulir di PBR, PBB Partai Golkar dan PKS.

Dilihat dari data diatas yang ingin menjadikan koalisi tersebut adalah calon itu sendiri, karna dia yang lebih proaktif untuk mendapatkan banyak partai.

b. Pendaftaran / Pengembalian Formulir

Pada tahap ini, masing-masing calon yang telah mengambil formulir mulai mendaftar dengan mengembalikan formulir lengkap dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Daftar partai politik dan calon yang mendaftar/mengembalikan formulir dapat dilihat pada tabel 11:



Tabel. 11. Daftar Partai atau gabungan partai dan nama calon yang mendaftar/mengembalikan formulir

Parpol/Gabungan Parpol	Calon / Pasangan calon yang mengambil formulir
Golkar	<ol style="list-style-type: none"> 1. H.Syahiran 2. H.Zamri 3. Zulkenedi Said,S
PAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamri 2. H.Akmal BB 3. H.Syahiran 4. Suhardi Hsb
PPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. H.Baharuddin R
Partai Demokrat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eni Kamal 2. H.Zamri 3. H.Akmal BB 4. H.Syahiran 4. H.Baharuddin R 5. Yulianto
PKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Epi Santoso 2. H. Zamri 3. H.Akmal BB 4. H.Syahiran 5. H.Baharuddin R 6. Suhardi hsb 7. Azwir
PDIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. H.Risnawanto
Partai Hanura	<ol style="list-style-type: none"> 1. H Baharuddin R 2. H.Syahrul Dt Marajo

Sumber: Hasil Penelitian di masing-masing partai politik dan gabungan partai politik

Dari tabel 11 dapat dilihat bahwa calon yang mendaftar ke masing-masing partai politik dan gabungan partai politik masih sendiri-sendiri dan belum menetapkan secara resmi pasangan masing-masing meskipun sudah menentukan partai mana yang menjadi pilihan untuk maju sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Disini terlihat bahwa hasil lobi-lobi antara partai dengan calon sudah mulai terlihat.

Partai politik yang menerima pendaftaran dan melakukan proses rekrutmen di partai yang sudah terbentuk dimasing-masing partai politik. *PPP* melakukan rekrutmen calon dengan membentuk tim yang terdiri dari pengurus masing-masing partai yang bergabung, demikian juga halnya dengan *PDIP*, proses rekrutmen dilakukan oleh yang sudah terbentuk.

Sementara partai lainnya yakni koalisi PAN dan PKS melakukan proses rekrutmen secara berbeda. Koalisi PAN dan PKS melaksanakan proses rekrutmen di internal masing-masing partai yang bergabung, artinya proses rekrutmen tidak dilakukan oleh koalisi tetapi masing-masing partai melakukan rekrutmen, hasil dari masing-masing partai tersebut yang nanti akan dibawa ke rapat koalisi untuk ditetapkan sebagai calon secara musyawarah.⁵⁸

3. Tahap Penyaringan / seleksi

Tahap Penyaringan atau seleksi dilakukan melalui dua cara yaitu seleksi administrasi dan wawancara. Seleksi administrasi dilakukan untuk mengecek kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon sesuai

⁵⁸ Wawancara dengan Ketua PKS, Fajri, Kamis 11 Februari 2011 di Simpang Empat.

dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara wawancara dilakukan dalam bentuk penyampaian visi misi oleh masing-masing calon. Dalam proses penyampaian visi misi tersebut terjadi dialog dan tanya jawab antara partai dengan calon, namun tidak ada dialog atau adu visi misi antar calon yang mendaftar di partai yang bersangkutan.

Partai PKS dan PPP melakukan dialog visi misi ini di internal masing-masing partai, Koalisi PDIP melakukan dialog visi misi dengan calon di depan pengurus koalisi, Koalisi Partai Golkar juga melakukan hal yang sama, dialog visi misi dilakukan di hadapan pengurus koalisi.

“Penyampaian visi misi dilakukan sendiri-sendiri oleh calon, tidak ada debat antar calon, hanya sebetulnya dialog antara calon dengan koalisi,” kata Fajri.⁵⁹

Hal senada juga disampaikan oleh calon kepala daerah dari partai Golkar bahwa

“visi misi disampaikan tidak langsung berhadapan dengan calon yang lain, cuma mempresentasikan program saja, kemudian ada dialog dengan panitia seleksi”.⁶⁰

Berbeda dengan partai-partai di atas, Partai PKS melakukan dialog visi misi dengan calon di internal masing-masing partai yang berkoalisi. Ini dilakukan karena proses rekrutmen juga dilakukan di internal masing-masing partai yang berkoalisi tersebut. Menurut Ketua koalisi Bangkit Bersama Asmu'i, penyampaian visi misi oleh calon dilakukan di masing-masing partai

⁵⁹ Wawancara dengan Ketua PKS Fajri, Kamis 11 Februari 2011 di Simpang Empat

⁶⁰ Wawancara dengan mantan calon wakil kepala daerah dari Partai Golkar, Asgul, Minggu 27 Februari 2011 di Kinali

sehingga koalisi nanti hanya memusyawarahkan dan menetapkan calon yang akan diusung dan didaftarkan ke KPUD.⁶¹

4. Tahap Penetapan

Proses penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diajukan ke KPUD oleh partai politik dan gabungan partai politik dilakukan melalui dua cara yakni secara musyawarah dan secara voting. PDIP dengan koalisinya (PBB dan PPRN), dan Koalisi *PAN dengan PKS* menetapkan calon yang akan diajukan ke KPU melalui musyawarah antara pengurus partai maupun pengurus koalisi yang dibentuk. Hal ini dilakukan karena calon yang mengikuti seluruh tahapan dalam proses rekrutmen hingga akhir proses penetapan hanya satu pasang calon sehingga otomatis pengurus partai atau gabungan partai sepakat untuk mengajukan calon yang bersangkutan.

“Karena hanya satu calon yang mengikuti proses itu sampai akhir, maka kami sepakat mengajukan calon yang bersangkutan”, kata Ketua PDIP.

Partai Golkar menetapkan calon melalui voting, karena di masing-masing partai dan koalisi partai mempunyai 3 (tiga) pasang calon yang mengikuti proses rekrutmen, karena tidak didapat kata sepakat dalam menetapkan pasangan calon maka dilakukan voting.

“karena calonnya lebih dari satu, maka untuk menetapkan calon yang akan diajukan, kita voting, yang memperoleh suara terbanyak itu yang akan kita ajukan ”, kata Ketua Partai Golkar.

⁶¹ Wawancara dengan Ketua Koalisi Bangkit Bersama Asmu,i, Minggu, 20 Februari 2011 di Simpang Empat

Daftar perolehan suara masing-masing pasangan calon dapat dilihat dalam tabel 12.

Dari proses penetapan calon sebagaimana tergambar dalam tabel 11 dapat dilihat bahwa ada dua cara yang dilakukan partai politik dan gabungan partai politik dalam menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diajukan/didaftarkan ke KPUD. Kedua cara tersebut adalah cara musyawarah dan cara pemungutan suara atau voting. Namun partai politik atau gabungan partai politik yang menetapkan calon secara musyawarah adalah partai politik dan gabungan partai politik yang hanya punya 1(satu) pasang calon, sementara parpol yang mempunyai beberapa pasang calon melakukan voting dalam menetapkan calon bahkan ada parpol yang langsung diiringi oleh pimpinan DPW/ DPP untuk mengajukan ke KPUD.

Tabel. 12. Perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Partai politik atau gabungan partai politik	Calon yang mengikuti proses rekrutmen	Perolehan suara masing-masing calon
Partai Golkar,PKB, PPPI.	1. H.Syahiran dan Asgus 2. Zulkenedi Said S / Yosmeri Yusuf	9 suara 2 suara
Koalisi Bangkit Bersama	1. H.Baharuddin R dan H.Syahrul	Ditetapkan melalui musyawarah
PAN dan PKS	H.Akmal BB dan Episantoso	Ditetapkan melalui musyawarah
Koalisi PDIP, PBR,PBB dan PPRN	H.Risnawanto dengan H.Nofrizal	Ditetapkan melalui musyawarah

Sumber: Hasil Penelitian di masing-masing partai dan gabungan partai

Dari Empat pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, proses penetapan calon dilakukan di masing-masing DPD tanpa ada campur tangan atau intervensi dari berbagai pihak, kecuali rekomendasi dari DPW maupun DPP yang diurus oleh pimpinan tingkat kabupaten masing-masing partai bersama calon. Sementara itu, partai politik atau gabungan partai politik juga melakukan cara-cara informal dalam proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada dua tipe rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Tipe pertama, proses rekrutmen dilakukan jauh sebelum dimulainya tahapan pilkada, artinya antara partai atau gabungan partai dengan calon sudah ada komunikasi sebelumnya. Pola komunikasi yang sudah terjalin lama inilah yang sangat berpengaruh terhadap keputusan partai dalam menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diajukan ke KPUD. Partai politik atau gabungan partai-politik yang masuk dalam tipe ini adalah Golkar, PKS, PDI. Ketiga partai atau gabungan partai ini sudah menjalin hubungan yang sudah lama dengan pasangan calon yang mereka usung. Calon yang diusung Golkar adalah kader partainya sendiri yang secara pasti tentu telah dikenal track recordnya oleh partai. Partai Golkar mengusung calon yang merupakan calon incumbent yang berpasangan dengan Mantan Ketua DPRD hasil Pemilu tahun 2004 dari Partai Golkar, begitu juga dengan Koalisi Bangkit Bersama, calon yang mereka usung adalah calon yang juga mereka dukung pada pilkada tahun 2005.

Tipe kedua, proses rekrutmen dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan pemilukada dimulai, hubungan antara partai dengan calon baru terjalin ketika partai atau gabungan partai membuka pendaftaran bagi calon dan calon mendaftar ke partai atau gabungan partai tersebut. Yang termasuk ke dalam tipe ini adalah PAN, Koalisi bangkit bersama.

Selanjutnya, apabila dilihat dari tujuan partai politik atau gabungan partai politik mengajukan pasangan calon dalam pemilukada, maka dapat dibedakan kedalam tiga kelompok. Kelompok pertama, tujuan pengajuan

pasangan calon adalah untuk memperoleh kekuasaan. Kelompok kedua adalah pengajuan calon yang dilakukan bertujuan hanya sebatas ikut meramaikan pesta demokrasi. Dan kelompok yang ketiga, pengajuan calon yang tujuannya adalah uang.

Dilihat dari tujuan pengajuan calon dari ketiga kelompok sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa partai – partai besar lebih mengutamakan faktor kedekatan dan kemampuan calon dari pada uang karena bagi partai besar uang tidak terlalu menjadi persoalan seperti yang diungkapkan Ketua PAN bahwa untuk proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah DPD mendapat suntikan dana dari DPP. Sementara itu bagi partai-partai kecil uang memang lebih menonjol karena mereka memang kesulitan dalam biaya operasional seperti yang diungkapkan oleh Ketua Koalisi Bangkit Bersama, bahwa untuk operasional selama proses pencalonan mereka butuh biaya, karena parpol tidak mempunyai dana untuk itu maka biaya itu dibebankan kepada calon.

Secara umum dapat digambarkan bahwa proses rekrutmen itu ada proses formal dan ada proses informal. Proses formal dilakukan melalaui beberapa tahapan mulai dari pendaftaran sampai penyaringan dan penetapan calon. Proses informal dilakukan melalui cara-cara lobi atau pendekatan antara partai dengan calon baik yang prosesnya panjang maupun yang prosesnya dadakan.

B. Kriteria Calon yang ditetapkan

Menurut Rinaldi ⁶², untuk melahirkan seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas haruslah melalui suatu proses rekrutmen yang benar. “Proses yang benar itu tidak harus dengan tahapan formal atau informal yang panjang, tetapi bagaimana partai politik menetapkan kriteria-kriteria tertentu terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.”⁶³

Pada proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat, syarat syarat yang ditetapkan bagi calon yang ingin maju dalam bursa Pilkada disesuaikan dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
4. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
5. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

⁶² Rinaldi adalah salah satu alumni Polokda Juga anggota KPU Pessel.

⁶³ Wawancara dengan .Rinaldi,, Kamis 14 Februari 2011 di Padang

- melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 8. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 9. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 10. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
 11. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 12. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 13. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 14. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 15. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 16. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

Disamping syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam UU tersebut, partai politik atau gabungan partai politik juga menetapkan syarat lainnya bagi calon, seperti harus menjadi anggota partai, membuat surat pernyataan / kesepakatan jika terpilih harus sanggup membangun dan membesarkan partai, dan membuat visi misi yang harus sesuai / sinkron dengan visi misi partai. Dilihat dari syarat-syarat yang ditetapkan oleh partai atau gabungan partai tersebut, calon diharuskan mengikuti semua peraturan partai yang lebih mengedepankan kepentingan partai atau kelompok daripada kepentingan masyarakat umum.

Golkar menjelaskan bahwa ada syarat lain yang ditetapkan partai. Menurut Ketua Partai Golkar,

“syarat yang ditetapkan partai pertama semacam surat pernyataan kalau seandainya terpilih dia menjadi kepala daerah berkewajiban dia bagaimana membesarkan dan membangun partai itu sendiri, disamping dia nanti milik masyarakat tapi juga karena dia diajukan partai mampu tidak dia memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai dengan keinginan partai itu sendiri.”

Koalisi Bangkit Bersama yang terdiri dari 12 partai juga mengungkapkan;

“ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bakal calon, ada dana operasional koalisi, koalisi membuat komitmen dengan calon, calon yang tidak dapat memenuhi komitmen itu terpaksa kami dis.”

PKB juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda,

“sebagai calon yang diusung partai, tentu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon yang bersangkutan, calon berhak untuk didukung dan juga berkewajiban untuk membantu biaya operasional partai dalam proses rekrutmen tersebut”.⁶⁴

Pimpinan PAN dan PPP mengungkapkan bahwa calon harus menjadi anggota partai, artinya, kalau calon yang diajukan sudah menjadi anggota partai secara otomatis si calon mempunyai kewajiban sebagai anggota partai sebagaimana yang diatur dalam AD/ART partai tersebut seperti kewajiban membangun partai dan

⁶⁴ Wawancara dengan Ketua PKB Jendri, Senin 28 Februari 2011 di Simpang Empat

memberikan kontribusi rutin kepada partai dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagai anggota partai. Disamping itu, PAN juga mensyaratkan kepada si calon harus mempunyai bukti dukungan dari sejumlah PAC dan ranting PAN di tingkat Kecamatan dan Kampung.

Dari syarat-syarat yang ditetapkan partai, tidak satupun dari partai politik dan gabungan partai politik tersebut yang menetapkan kriteria khusus menyangkut kemampuan calon baik di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya dan tidak ada teori yang dapat menjelaskan bentuk-bentuk kriteria tersebut. Karena menurut Rinaldi, dalam proses rekrutmen calon kepala daerah tersebut seharusnya partai politik dan gabungan partai politik tersebut harus mempunyai kriteria yang jelas, dengan demikian calon yang akan dilahirkan/ditetapkan nantinya adalah calon yang telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut.⁶⁵

Masih menurut Rinaldi, kriteria yang ditetapkan bagi calon kepala daerah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah ke depan, artinya sebelum menetapkan kriteria tersebut partai politik dan gabungan partai politik harus mampu melihat, membaca, dan memahami kebutuhan masyarakat di daerah serta pembangunan di bidang apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil kajian itu partai politik dapat menetapkan kriteria apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pasaman Barat, partai politik dan gabungan partai politik belum melakukan hal itu,

⁶⁵ Wawancara dengan Rinaldi, Senin 14 Februari 2011 di Padang

syarat yang ditetapkan masih lebih mengutamakan kepentingan partai atau kelompok dari pada kepentingan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari syarat yang mengharuskan calon membuat visi misi yang sesuai / sinkron dengan visi misi partai. Partai mensyaratkan calon harus mampu memberikan kontribusi kepada partai, tetapi tidak ada syarat yang mengharuskan calon untuk dapat memberikan waktunya atau menyumbangkan pemikirannya untuk kesejahteraan masyarakat. Calon harus menjadi anggota partai sehingga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap partai, tetapi tidak ada partai dan gabungan partai yang mengharuskan calon untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap masyarakat yang akan memilihnya. Menurut Rinaldi, seharusnya dalam proses rekrutmen tersebut ada semacam kontrak antara partai dengan calon, tetapi kontrak yang dibuat bukan untuk kepentingan partai melainkan untuk kepentingan masyarakat.⁶⁶

Disamping itu, dalam menetapkan kriteria calon yang akan ditetapkan pun partai politik dan gabungan partai politik masih bersifat primordial. Dilihat dari biodata calon, penetapan pasangan calon (Si A berpasangan dengan siapa) masih didominasi kuat oleh asal daerah masing-masing calon. Jika calon Kepala daerahnya bersasal dari arah utara Pasaman Barat maka calon wakil kepala daerahnya harus berasal dari arah selatan Pasaman Barat dan begitu sebaliknya.

C. Faktor yang Mempengaruhi Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Proses penetapan oleh partai politik dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan kelengkapan syarat yang diajukan. Dilihat dari segi aturan, penetapan

⁶⁶ Wawancara dengan Rinaldi, Senin, 14 Februari 2011 di Padang

calon yang akan diajukan ke KPUD tidak ada pengaruh atau intervensi dari pihak manapun, baik dari DPP partai maupun dari masyarakat karena partai atau gabungan partai berwenang penuh dalam proses penetapan tersebut. Menurut pimpinan PDIP, ada dana bantuan dari DPP dalam proses rekrutmen tersebut tetapi tidak mempengaruhi proses penetapan calon karena penetapan calon sudah sepenuhnya kewenangan DPD dengan persetujuan jauh sebelumnya oleh DPP. Sedangkan masyarakat juga tidak punya pengaruh apapun dalam proses penetapan calon. Meskipun dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sudah diatur bahwa dalam proses penetapan calon partai politik harus memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa setiap partai politik maupun gabungan partai politik tidak melakukan uji publik terhadap calon yang akan diajukannya ke KPUD. Alasannya bermacam-macam.

Pimpinan PDIP mengatakan bahwa syarat dukungan dari cabang dan ranting yang harus dipenuhi oleh calon sudah merupakan bentuk dukungan dari masyarakat di masing-masing kecamatan dan kampung. Pimpinan Golkar mengatakan bahwa uji publik pada dasarnya sudah terjadi jauh sebelum proses rekrutmen dilakukan, masyarakat sudah menilai si calon melalui kiprahnya selama ini dimasyarakat. *Partai Golkar* mengatakan secara spontan nanti masyarakat akan menilai siapa yang layak atau tidak layak menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sementara Koalisi PAN dan PKS memberi alasan karena waktu yang terbatas, penetapan pasangan calon dilakukan pada hari terakhir pendaftaran di KPUD sehingga tidak ada waktu lagi untuk melakukan uji publik.

Meskipun dalam aturan tidak ada yang mempengaruhi proses penetapan calon tersebut, hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor yang berpengaruh adalah :

1. Faktor Oligarki

Oligarki partai sangat berpengaruh dalam proses rekrutmen tersebut. Oligarki dalam kamus bahasa Inggris berarti pemerintahan kecil, disini saya simpulkan bahwa pimpinan DPP dalam sebuah partai politik ibarat kepala pemerintahan kecil didalam partainya yang mempunyai kekuasaan terhadap pimpinan tingkat DPW dan DPD atau nama sejenisnya. Jadi proses penetapan calon hanya didominasi oleh elit-elit pimpinan partai atau pimpinan koalisi bagi partai yang berkoalisi.

2. Faktor Primordial

Primordial dalam kamus Bahasa Inggris berarti mula-mula/asal. Primordial oleh Tangkilisan disebut dengan criteria partikularistik yang lebih didasarkan pada factor satu agama, keluarga, almamater dan asal daerah. Jadi disini saya mengambil istilah primordial dengan asal daerah karena dikecamatan Pasaman Barat daerahnya yang memanjang dari utara ke selatan dan memiliki tiga etnis (Minang, Jawa, Mandailing).

Faktor primordial juga sangat berpengaruh sebagaimana dijelaskan dalam bahasan terdahulu bahwa dalam menetapkan pasangan calon yang akan diajukan ke KPU, pengaruh daerah asal calon masih sangat dominan dan sangat menentukan keterpilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didalam Pemilu Kada.

3. Uang.

Disamping dua faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen tersebut, ada faktor lain yang tidak kalah penting yaitu uang. Uang merupakan suatu faktor yang cukup menentukan dalam proses penetapan calon tersebut. Kalau dilihat dari proses penetapan calon oleh partai politik dan gabungan partai politik, koalisi *Bangkit Bersama* terang-terangan memperlihatkan bahwa uang menjadi penting dalam proses penetapan calon, hal ini terlihat dari keputusan yang diambil oleh koalisi *Bangkit Bersama* yang membatalkan Yulianto menjadi calon wakil kepala daerah karena tidak sanggup menyerahkan uang sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Partai lain seperti PBB, PPRN, Partai Pelopor, PBR, Gerindra, PAN dan Golkar secara implisit juga menetapkan syarat “uang” dengan membebankan biaya operasional kepada calon selama proses rekrutmen berlangsung dan mengharuskan si calon untuk membesarkan partai serta menjadi anggota partai politik, dengan menjadi anggota partai si calon secara otomatis mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam AD/ART masing-masing partai yakni kewajiban memberikan bantuan atau kontribusi kepada partai selama menjadi anggota terutama jika terpilih sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

Disisi lain, penetapan Akmal dan Episantoso oleh Koalisi PAN dan PKS mendapat reaksi keras dari calon yakni pasangan Suhardi Hsb dan Zambri. Abrar menganggap dirinya batal diajukan ke KPUD bukan karena ia tidak sanggup memenuhi tuntutan sejumlah uang dari Koalisi Pasaman Barat Badunsanak tetapi karena ia terlambat menyerahkan uang dimaksud dan adanya penekanan dari DPW

PAN serta bekejasama dengan KPU. Ketika hal ini dikonfirmasi ke Koalisi PAN dan PKS, pengurus koalisi sekaligus tim seleksi membenarkan hal tersebut. Menurutny,

“kami terpaksa mendis Suhardi dan Zambri karena ia tidak menepati komitmen yang telah dibuat, kami memberikan dia batas waktu untuk memenuhi komitmen tersebut, ternyata dia tidak sanggup memenuhi komitmen tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.”⁶⁷

Zambri yang merasa tidak puas dengan keputusan Koalisi PAN dan PKS akhirnya melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik, karena pembatalan terjadi pada hari terakhir pada jadwal pencalonan diwaktu dia masih dikantor KPU.

Menurut Calon yang tidak lolos, Zamri mengatakan bahwa: “awalnya saya sudah ok berpasangan dengan Suhardi hasibuan (ketua PAN) Koalisi PAN, PPDI, Barnas, PKB, tetapi DPW dan DPP PAN menginginkan koalisi dengan PKS dengan calon Bupati H.Akmaluddin Batu Bara yang berpasangan dengan Episantoso. Pembatalan itu terjadi pada hari terakhir pendaftaran sewaktu saya sedang menunggu kelengkapan berkas administrasi di kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat dihadapan masa pendukung saya dipermalukan seperti itu, maka saya langsung melaporkan permasalahan tersebut kepada Polres Pasaman Barat.”

Dari pernyataan tersebut ternyata pimpinan DPD tingkat kabupaten tidak mempunyai kewenangan penuh sebelum mendapat persetujuan DPW dan DPP partai politik, karena kewenangan penuh dalam parpol tersebut terletak pada DPP.

Anggota Polres Pasbar Masdianto mengatakan bahwa : “ Memang benar Zambri tersebut melaporkan tentang kejadian pada hari terakhir pendaftaran pencalonan dengan pengaduan pencemaran nama baik, tetapi setelah diselidiki tidak ada yang bisa dijerat dengan pasal tentang pencemaran nama baik, karena KPUD,

⁶⁷ Wawancara dengan Ketua PAN Pasaman Barat, Erwin ,Selasa 22 Februari 2011 di Kinali

pimpinan Parpol. masing-masing menjalankan tugasnya sesuai kewenangannya masing-masing.

KPUD sebagai penyelenggara Pilkada ketika dimintai keterangannya menyatakan bahwa yang dilakukan KPUD telah sesuai dengan aturan yang berlaku, KPUD hanya menerima pendaftara calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan melampirkan syarat – syarat sebagaimana yang diatur dalam UU 32 tahun 2004. mengenai tuduhan yang dilakukan oleh Zambri, KPUD menanggapi dengan mengatakan bahwa tuduhan itu tidak beralasan karena KPUD dituduh telah bekerjasama dengan salah satu partai politik tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan, sementara proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik adalah mutlak kewenangan partai politik sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, dan KPUD tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri hal tersebut.⁶⁸

D. Analisis dan Interpretasi Data

Pada bagian ini penulis mendiskusikan hasil temuan penelitian dengan teori yang dikutip pada bagian terdahulu. Dari hasil tersebut maka diketahui apakah hasil penelitian menguatkan pendapat yang telah ada atau berhasil mengungkap apa yang belum ditemukan sebelumnya.

Menurut Ramlan Surbakti, rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan

⁶⁸ Wawancara dengan Ketua KPUD Pasaman Barat Yondrizal, Rabu 23 Februari 2011 di Talu

pemerintahan pada khususnya.⁶⁹ Apabila dikaitkan dengan proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik dan gabungan partai politik, rekrutmen calon kepala daerah berarti adalah suatu proses seleksi seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem pemerintahan yakni sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selanjutnya Seligmen mengemukakan bahwa rekrutmen sebagai suatu proses terdiri dari⁷⁰ :

- a. Penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada eligibilitas (pemenuhan syarat pencalonan)
- b. Pencalonan atau proses dua tahap yang mensyaratkan inisiatif dan penguatan
- c. Seleksi, yakni pemilihan calon elit politik yang sebenarnya.

Dalam proses rekrutmen, ada tahapan yang harus dilakukan, Seligmen menyebut ada tahap penyaringan, tahap pencalonan dan tahap seleksi. Pernyataan Seligmen tersebut sesuai dengan hasil temuan penelitian bahwa proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimulai dengan tahap penyaringan, kemudian tahap pencalonan atau pengajuan calon serta yang terakhir adalah tahap seleksi atau pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebenarnya oleh masyarakat pemilih. Namun yang dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik pada Pemilu Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010 merupakan rekrutmen pada tahapan penyaringan dan tahapan ini juga dilakukan melalui

⁶⁹ Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta. 1999, hal. 118

⁷⁰ Tangkilisan. *Kebijakan Publik yang Membumi*. YPAPI. Yogyakarta. 2003. hal. 190

beberapa tahapan; mulai dari tahap persiapan, tahap penjaringan, tahap penyaringan / seleksi, dan tahap penetapan.

Apabila dalam proses rekrutmen diperlukan adanya suatu sistem yang mengatur pelaksanaan rekrutmen tersebut, Menurut Prihatmoko ada dua sistem rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik;

1. Sistem pemilihan tertutup

Sistem pemilihan tertutup adalah sistem rekrutmen bakal calon yang dilakukan hanya oleh pengurus partai politik dengan berbagai variasi sistem.

2. Sistem konvensi

Sistem konvensi dilakukan dengan cara pemilihan pendahuluan terhadap bakal calon dari partai politik oleh pengurus dan/atau anggota partai sebagaimana dilakukan Partai Golkar dalam Pemilu Presiden / Wakil Presiden 2004.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Nazaruddin Syamsudin sebagaimana dikutip oleh Tangkilisan bahwa, sistem rekrutmen politik dibedakan menjadi dua yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warganegara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Rekrutmen tertutup yaitu adanya batasan dalam hal penyeleksian sehingga tidak setiap warganegara dapat ikut serta dalam proses penyeleksian tersebut. Dalam sistem tertutup ini orang akan mendapatkan posisi elit melalui cara – cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain.⁷¹

⁷¹ Tangkilisan. *Kebijakan Publik yang Membumi*. YPAPI. Yogyakarta. 2003. hal. 190

Dalam proses rekrutmen calon kepala daerah pada Pilkada 2010 khususnya di Kabupaten Pasaman Barat, partai politik atau gabungan partai politik menggunakan sistem konvensi atau sistem terbuka sebagaimana yang dikemukakan oleh prihatmoko dan Nazaruddin. Partai politik melakukan pemilihan pendahuluan terhadap para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan cara membuka akses atau kesempatan bagi setiap warga masyarakat yang telah mempunyai hak pilih untuk ikut dalam seleksi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik kader partai maupun bukan kader partai. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menemukan bahwa secara resmi partai politik dan gabungan partai politik membuka kesempatan bagi setiap warga masyarakat untuk ikut bersaing dalam bursa pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan oleh partai politik dan gabungan partai politik yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik tidak hanya mengusung kader partainya tetapi juga mengusung calon dari luar partainya meskipun ada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan. Dari 8 orang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung partai politik dan gabungan partai politik, 5 orang yang merupakan kader partai. Selain itu, dari 21 Calon yang mendaftar ke beberapa partai politik dan gabungan partai politik, 3 orang diantaranya berasal dari luar partai dan hanya 5 orang yang merupakan kader partai. Artinya partai politik dan gabungan partai politik memang telah memberi akses yang luas bagi calon dari luar partai untuk ikut dalam proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut meskipun akhirnya yang benar-benar mengikuti proses itu hanya 12 orang. Namun, dalam proses penetapan calon partai politik atau gabungan partai politik sangat oligarkis. Pimpinan partai atau pimpinan koalisi mempunyai wewenang penuh dalam

menetapkan siapa yang akan diajukan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ke KPU.

Selanjutnya, kriteria yang digunakan dalam proses rekrutmen akan menentukan hasil dari proses tersebut, kriteria yang ditetapkan akan menjadi penentu dalam melahirkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas dan mampu memimpin daerahnya secara demokratis sehingga pada akhirnya akan melahirkan seorang pemimpin yang demokratis di daerah.

Menurut Tangkilisan, ada dua kriteria khusus dalam proses rekrutmen yaitu kriteria universal dan kriteria partikularistik;

1. Kriteria universal merupakan proses rekrutmen dilakukan berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditunjukkan lewat tes atau ujian dan prestasi.
2. Kriteria partikularistik merupakan proses rekrutmen yang bersifat primordial yang didasarkan pada suku, agama, ras, keluarga, almamater atau faktor status.

Secara umum, kriteria yang digunakan oleh partai politik dan gabungan partai politik dalam proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kriteria partikularistik, calon yang dipilih umumnya adalah orang-orang yang merupakan penduduk asli di daerah yang bersangkutan meskipun tidak berdomisili di daerah itu, hal ini sesuai dengan tujuan otonomi daerah itu sendiri yaitu untuk mendekatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka orang yang berasal dari daerah itu dianggap mampu memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta dapat memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

Meskipun dalam proses rekrutmen calon kepala daerah tersebut dilakukan beberapa tahapan seleksi / tes, namun bukan merupakan aplikasi dari kriteria universal seperti yang diungkapkan Tangkilisan, seleksi yang dilakukan hanyalah sebagai formalitas dari suatu proses rekrutmen yang dilakukan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebelum proses rekrutmen itu dilakukan, antara partai politik dan gabungan partai politik dengan calon sudah ada pendekatan sebelumnya, tahapan hanyalah formalitas belaka.

Kemudian dalam proses penetapan calon yang akan diajukan ke KPUD, partai politik dan gabungan partai politik memiliki kewenangan penuh tanpa ada intervensi atau campur tangan dari pihak DPP maupun DPW masing-masing partai politik. Hal ini juga yang menyebabkan partai politik dan gabungan partai politik membuat suatu kesepakatan atau semacam perjanjian dengan calon baik untuk menyediakan sejumlah dana jika mau diusung sebagai calon maupun untuk menjadi anggota partai dan menyesuaikan visi misi partai dengan visi misi calon dalam menjalankan pemerintahannya jika terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Intinya, si calon harus siap menyumbangkan sejumlah dana kepada partai politik jika mau maju sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Meskipun tidak ada pengaruh baik dari DPP dan DPW masing-masing partai dan dari masyarakat atau tokoh-tokoh tertentu dalam proses penetapan calon yang akan diajukan ke KPUD, faktor oligarki dan primordial menjadi dua factor yang sangat mempengaruhi proses rekrutmen oleh partai politik dan gabungan partai politik tersebut. Disamping itu, partai politik dan gabungan partai politik juga menggunakan cara-cara yang oleh Rush dan Althoff disebut dengan patronage. Patronage merupakan bagian dari suatu sistem penyuapan dan sistem korupsi yang

rumit, yang memasuki banyak bidang kehidupan masyarakat. Cara ini juga merupakan salah satu sarana bagi pengrekrutan politik karena untuk masuk menjadi anggota parlemen dan dinas sipil embrionik, hampir selalu dapat dipastikan harus melalui sistem patronage.⁷²

Ungkapan Rush dan Althoff tersebut dapat kita temui dalam proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik dan gabungan partai politik pada Pemilu pada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010. Partai politik mensyaratkan sejumlah uang bagi calon yang ingin diusung dan didaftarkan ke KPUD dan sebaliknya si calon juga siap untuk mengeluarkan sejumlah uang asal bisa maju sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Meskipun hasil penelitian menunjukkan hanya Koalisi Bangkit bersaqma dan calonnya yang melakukan cara tersebut, secara implisit kita dapat melihat bahwa partai dan gabungan partai yang lainnya juga melakukan hal yang sama walaupun caranya berbeda.

Secara Teroritis mestinya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menghasilkan seorang pemimpin yang demokratis, akuntabel, transparan dan responsif. Akan tetapi melihat proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik, kita melihat justru tidak akan menghasilkan seorang pemimpin yang demokratis, akuntabel, transparan dan responsif. Karena dari hasil penelitian terlihat bahwa dalam proses rekrutmen tersebut partai politik justru sangat oligarkis. Proses rekrutmen hanya melibatkan kalangan tertentu yakni pimpinan partai politik atau pimpinan koalisi yang dibentuk. Selain itu, dalam menetapkan kriteria calon partai politik juga sangat pragmatis sehingga kriteria itu disusun sebenarnya setelah calon

⁷² Rush Michael, *op.cit*, hal. 186

didapatkan artinya partai politik mencari dulu orang-orang yang akan dicalonkan baru setelah itu menetapkan kriteria sesuai dengan calon yang sudah ada tersebut.

Partai Golkar membuat sistem konvensi dalam proses rekrutmen padahal sebenarnya calon yang akan diajukan adalah Asgul kader partai itu sendiri, sementara partai-partai lain yang membentuk sebuah koalisi lebih mengedepankan tujuan pragmatis dalam menetapkan kriteria calon. Yang paling menarik adalah Koalisi Pasaman Barat Badunsanak yang terdiri dari 12 partai besar dan kecil yang tidak memperoleh kursi DPRD. Koalisi ini melakukan seleksi terhadap 3 pasang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan membuat aturan siapa yang sanggup membuat komitmen dengan partai lebih besar dengan batas waktu yang ditetapkan akan diajukan sebagai calon kepala daerah. Syahiran terlambat dari batas waktu yang ditetapkan, kemudian diputuskan Baharuddin R sebagai calon dan mampu memenuhi komitmen tersebut.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, mengidentifikasi kriteria yang digunakan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan didaftarkan ke KPUD pada Pilkada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama sesuai dengan tujuan penelitian; pertama proses, kedua kriteria, dan ketiga faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen tersebut.

Dilihat dari prosesnya, rekrutmen dilakukan melalui proses formal dan informal. Proses formal dilakukan melalui empat tahapan, sedangkan proses informal dilakukan melalui pendekatan atau lobi-lobi antara partai politik atau gabungan partai politik dengan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Proses informal yang dilakukan juga ada yang prosesnya panjang dan ada proses pendek atau dadakan dimana hubungan antara partai dengan calon baru terjalin bersamaan dengan proses Pilkada akan dimulai.

Kriteria yang digunakan dalam rekrutmen tersebut disamping kriteria umum sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juga ada kriteria khusus yang ditetapkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Namun kriteria khusus yang ditetapkan parpol atau gabungan parpol lebih bersifat primordial yang oleh Tangkilisan disebut dengan kriteria partikularistik yang lebih didasarkan pada asal daerah.

Selanjutnya, dalam penetapan calon yang akan diajukan ke KPU pun sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor oligarki partai dan faktor primordial. Proses penetapan didominasi oleh elit atau pimpinan partai politik. Bagi partai politik yang berkoalisi, penetapan calon didominasi oleh para pimpinan partai yang berkoalisi tersebut. Disamping itu, faktor primordial juga mempunyai pengaruh yang tak kalah penting. Kabupaten Pasaman Barat yang wilayahnya memanjang dari Utara sampai Selatan mengakibatkan partai politik atau gabungan partai politik menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari dua arah tersebut, jika calon kepala daerah berasal dari daerah Utara Pasaman Barat maka calon wakilnya harus yang berasal dari daerah Selatan Pasaman Barat dan begitu sebaliknya.

Selain itu ada hal yang cukup penting yang tidak dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik sebelum menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diajukan ke KPU yakni melakukan uji public terhadap calon-calon yang akan ditetapkan dan didaftarkan ke KPU tersebut. Alasannya beragam, ada karena sudah mendapat dukungan dari pimpinan partai tingkat kecamatan maupun karena keterbatasan waktu sehingga partai politik tidak melakukan uji publik terhadap calon tersebut.

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

I. Informan untuk pimpinan partai politik

1. Bagaimana pelaksanaan penerimaan pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di partai politik bapak?
2. Apakah boleh calon mendaftar dari luar partai politik bapak?
3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon untuk mendaftar di partai politik bapak?
4. Bagaimana proses terjadinya koalisi beberapa partai untuk mengusung satu pasang calon?

II. Informan untuk calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1. Apakah proses rekrutmen telah sesuai dengan pola demokrasi?
2. Apakah ada bapak membayar untuk di terima sebagai calon oleh partai politik?
3. Apakah diberlakukan sama oleh pimpinan parpol dalam pendaftaran bapak?
4. Bagaimana Bapak bisa diterima oleh beberapa partai untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah?

III. Informan Komisi Pemilihan Umum dan Panwas Pemilu Kada .

1. Apakah telah sesuai dengan pola demokrasi tentang rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh parpol di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apakah ada kasus waktu penerimaan pendaftaran oleh pimpinan partai politik ke KPU?
3. Apakah ada konflik internal parpol atau gabungan parpol pada masa perbaikan berkas calon?



SURAT PENCALONANNomor : 05/PB/14/IV/2010.

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, bersama ini diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat oleh Dewan Pimpinan Daerah) Kabupaten Pasaman Barat Partai :

1. Partai Persatuan Pembangunan
2. Partai Demokrat
3. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
5. Partai Bintang Reformasi (PBR)
6. Partai Pelopor
7. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
8. Partai Matahari Bangsa (PMB)
9. Partai kedaulatan
10. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)
11. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
12. Partai Pemuda Indonesi (PPI)
13. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
14. Partai Buruh
15. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
16. Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)
17. Partai Barisan Nasional (Barnas)

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan adalah :


- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Calon Bupati | : Drs.H. BAHARUDDIN, R.MM |
| 2. Calon Wakil Bupati | : H. SYAHRUL, Dt, MARAJU, S.Pd |

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Simpang Empat, 19 Maret 2010
Dewan Pimpinan Daerah/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik
yang mengajukan Pasangan Calon *)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Ketua DPD/ DPC
Kabupaten Pasaman Barat



(Drs. H. BAHARUDDIN, R.MM)



Sekretaris DPD/ DPC
Kabupaten Pasaman Barat



(H. SYAHRUL, Dt, MARAJU, S.Pd)

Partai Demokrat

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(YULIANTO, SH)



Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(ANTONIUS, SH)

Partai PPRN

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(PASRIAL)



Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(NURHAYATI)

Partai HANURA

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(H. SYAHRUL, Dt, MARAJO, S.Pd)



Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(H. ABU SYAIB, S.Pd)

Partai PBR

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(MAIYUSRIZAL)

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(ZAINAL RAHAB)

Partai PELOPOR

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(MUHYIDIN BATUBARA, SH)



Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(SAMSUL)

Partai PMB

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(Drs. AHMAD THAMRIN, SH)



Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(AHMAD LUBIS)

Partai KEDAULATAN

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(IMRAN EFENDI. A.Md)



(HELENA SARI)

Partai PDP

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(AGUS MAHARAY)




(ARLISMANTO)

Partai PPPI

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(FIRDAUS. A.Md)



(AHMADI)

Partai PPI

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(DAMLIS)



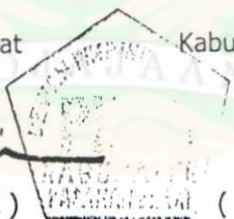
(M.TAMER)

Partai PKPB

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(Ir. CHUDHRI NAWAWI)



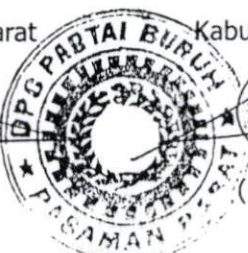
(DESWARYETI)

Partai BURUH

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

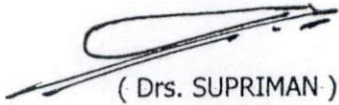
(HIZRA, SH)



(ALMAIZAR, SH)


Partai PDK

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(Drs. SUPRIMAN)



Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(RADIUS RAVENDRA)

Partai PKPI

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

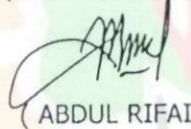
(DARMAWANTO, SH)

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(WANDRA. A.Md)

Partai BARNAS

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(ABDUL RIFAI)

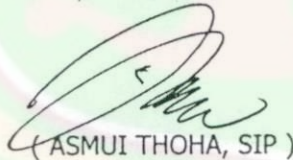


Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(ANDI ERIZAL)

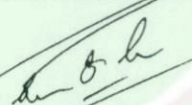
Partai GERINDRA

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(ASMUI THOHA, SIP)



Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(AFRIZAL, Dt. BANDARO KALI)

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

SURAT PERNYATAAN

KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari sabtu tanggal 19 bulan Maret tahun dua ribu sepuluh bertempat di Simpang Empat, yang bertanda tangan di bawah ini gabungan Dewan Pimpinan Daerah/ Cabang Kabupaten Pasaman Barat,

1. Partai Persatuan Pembangunan
2. Partai Demokrat
3. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
5. Partai Bintang Reformasi (PBR)
6. Partai Pelopor
7. Partai Matahari Bangsa (PMB)
8. Partai Kedaulatan
9. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)
10. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
11. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
12. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
13. Partai Buruh
14. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
15. Partai Barisan Nasional (Basarnas)
16. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah di ajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana di maksud dalam surat pencalonan (Model B-KWK).


Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana di maksud dalam Pasal 59 Ayat (5) huruf a dan huruf b Undang-undang 32 tahun 2004 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Jo Pasal 42 Ayat (2) huruf a Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2008 Jo Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan komisi Pemilihan umum Nomor 68 tahun 2009

Simpang Empat, 19 maret 2010

Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(Drs. H. BAHARUDDIN .R.MM)



Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(H. SUDIRMAN.S)

Partai Demokrat

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(YULIANTO,SH)



Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(ANTONIUS,SH)

Partai PPRN

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(PASRIAL)



Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(NURHAYATI)

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(H.SYHRUL,Dt, MARAJU,S.Pd)



Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(H. ABU SYAIB,S.Pd)

Partai PBR

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(MAIYUSRIZAL)

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(ZAINAL RAHAB)

Partai PELOPOR

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(MAHYUDDIN BATUBARA,SH)

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(SAMSUL RIZAL)

Ketua PD
Kabupaten Pasaman Barat

(THAMRIN.KN)



Sekretaris PD
Kabupaten Pasaman Barat

(AHMAD LUBIS)

Partai KEDAULATAN

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

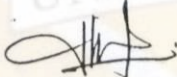
(IMRAN EFENDI. A.Md)

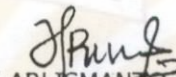
(HELENA SARI)

Partai PDP

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

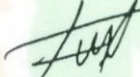

(AGUS MAHARAY)

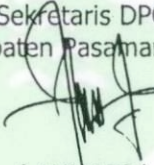

(ARLISMANTO)

Partai PPPI

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

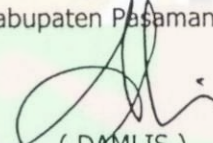

(FIRDAUS. A.Md)


(AHMADI)

Partai PPI

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(DAMLIS)


(M.TAHER)

Partai PKPB

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(Ir. CHUDHRI NAWAWI)

(DESWARYETI)

Partai BURUH

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(HIZRA, SH)




(ALMAIZAR, SH)

Partai PDK

Ketua DPK
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPK
Kabupaten Pasaman Barat

(Drs. SUPRIMAN)

(RADIUS AVENDRA)

Partai BARNAS

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

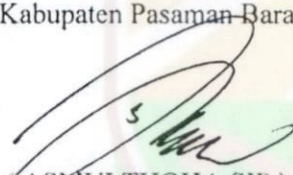
(ABDULRIFAI)

(ANDI ERIZAL)

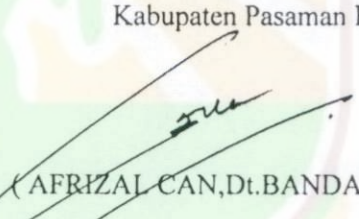
Partai GERINDRA

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(ASMUI THOHA.SIP)




(AFRIZAL CAN, Dt. BANDARO KALI)



**SURAT PERNYATAAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, gabungan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

1. Partai Persatuan Pembangunan
2. Partai Demokrat
3. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
5. Partai Bintang Reformasi (PBR)
6. Partai Pelopor
7. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
8. Partai Matahari Bangsa (PMB)
9. Partai kedaulatan
10. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)
11. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
12. Partai Pemuda Indonesi (PPI)
13. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
14. Partai Buruh
15. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
16. Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)
17. Partai Barisan Nasional (Barnas)

menyatakan akan tidak menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

Demikian surat pernyataan ini dimuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Simpang Empat, 19 Maret 2010
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah /Cabang
Partai Politik Yang mengajukan Pasangan Calon
Partai PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

Ketua DPD/ DPC Kabupaten
Pasaman Barat

Sekretaris DPD/ DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(Drs. BAHARUDDIN, R.MM)

(SUDIRMAN. S)



Partai Demokrat

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(YULIANTO, SH) (ANTONILUS, SH)

Partai PPRN

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(PASRIAL) (NURHAYATI)

Partai HANURA

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(H. SYAHRUL, Dt, MARAJO, S.Pd) (H. ABU SYAIB, S.Pd)

Partai PBR

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(MAIYUSRIZAL) (ZAINAL RAHAB)

Partai PELOPOR

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(MUHYIDIN BATUBARA, SH) (SAMSUL)

Partai PMB

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

(Drs. AHMAD THAMRIN, KN) (AHMAD LUBIS)

Partai KEDAULATAN

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(IMRAN EFENDI. A.Md)

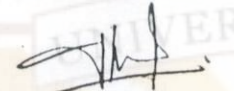


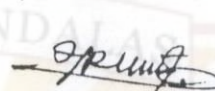

(HELENA SARI)

Partai PDP

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

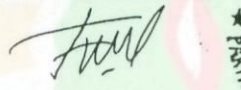

(AGUS MAHARAY)


(ARLISMANTO)

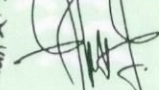
Partai PPPI

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(FIRDAUS. A.Md)

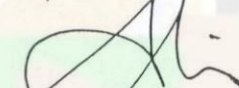



(AHMADI)


Partai PPI

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(DAMLIS)

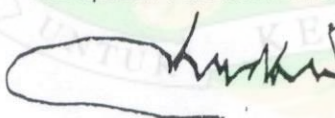


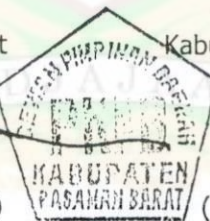

(M.TAHER)

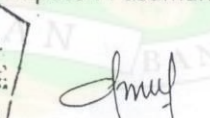
Partai PKPB

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(Ir. CHUDHRI NAWAWI)

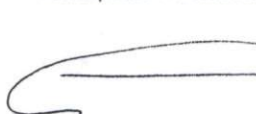



(DESWARYETI)


Partai BURUH

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(HIZRA, SH)

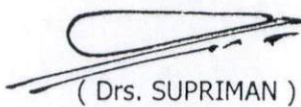



(ALMAIZAR, SH)


Partai PDK

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(Drs. SUPRIMAN)




(RADIUS RAVENDRA)

Partai PKPI

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat

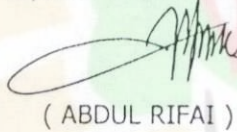
(DARMAWANTO, SH)

(WANDRA. A.Md)

Partai BARNAS

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(ABDUL RIFAI)

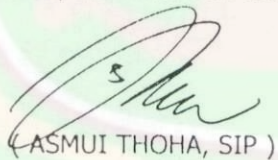



(ANDI ERIZAL)

Partai GERINDRA

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat


(ASMUI THOHA, SIP)


(AFRIZAL, Dt. BANDARO KALI)

**NAMA TIM KAMPANYE DAN JURU KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2010**

Nama pasangan calon : 1. Drs. H. BAHARUDDIN, R.MM
Bupati dan Wakil Bupati : 2. H. SYAHRUL, Dt. MARAJU, S.Pd

Nomor Rekening khusus dana : 1.
kampanye Pasangan calon dan tim : 2. Bupati dan Wakil Bupati Pasangan
kampanye : Drs. H. BAHARUDDIN, R.MM &
H. SYAHRUL, Dt. MARAJU, S.Pd

Bersama ini mengajukan nama tim kampanye dan juru kampanye pasangan calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap : Capt. H. EPRIADI ASDA, M.Mar
Alamat : PADANG
Pekerjaan/Jabatan : ANGGOTA DPR RI
2. Nama lengkap : H. ISMAIL HASAN, SH
Alamat : SIMPANG EMPAT
Pekerjaan/Jabatan : WIRA SWASTA
3. Nama lengkap : AMORA LUBIS, S.Sos
Alamat : SILAPING RANAH BATAHAN
Pekerjaan/Jabatan : WIRA SWASTA
4. Nama lengkap : JENDRI, S.Ag
Alamat : PADANG TUJUH
Pekerjaan/Jabatan : ANGGOTA DPRD
5. Nama lengkap : MAHYUDDIN BATU BARA, SH
Alamat : AIR BANGIS
Pekerjaan/Jabatan : ANGGOTA DPRD
6. Nama lengkap : JULIANTO, SH
Alamat : JAMBAK
Pekerjaan/Jabatan : ANGGOTA DPRD
7. Nama lengkap : ASMUI THOHA, S.Ip
Alamat : UJUNG GADING
Pekerjaan/Jabatan : WIRA SWASTA

8. Nama lengkap : ZAINAL RAHAB
Alamat : KINALI
Pekerjaan/Jabatan : WIRA SWASTA
9. Nama lengkap : Drs. THAMRIN KN
Alamat : SUNGAI AUR
Pekerjaan/Jabatan : GURU AGAMA
10. Nama lengkap : Drs. SYUKRIADI SYUKUR, M.Pd
Alamat : SIMPANG EMPAT
Pekerjaan/Jabatan : GURU AGAMA
11. Nama lengkap : Ust. ISLAHUDIN
Alamat : PARIT KOTO BALINGKA
Pekerjaan/Jabatan : GURU AGAMA
12. Nama lengkap : MAIYUSRIZAL
Alamat : SIMPANG EMPAT
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
13. Nama lengkap : BUYA MUNIR
Alamat : PINAGAR
Pekerjaan/Jabatan : GURU AGAMA
14. Nama lengkap : HIZRA, SH
Alamat : JAMBAK
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
15. Nama lengkap : Ust. SAMIDAS, S.Ag
Alamat : SIALANG
Pekerjaan/Jabatan : GURU AGAMA
16. Nama lengkap : H. ABU SYAIB, S.Pd
Alamat : SUNGAI AUR
Pekerjaan/Jabatan : ANGGOTA DPRD
17. Nama lengkap : PARMOHONAN, S.Hi
Alamat : DURIAN TIGA BATANG
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA

18. Nama lengkap : BUYUNG NIKMAT
Alamat : LUHAK NAN DUO
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
19. Nama lengkap : ZAINAL AQIL
Alamat : UJUNG GADING
Pekerjaan/Jabatan : GURU AGAMA
20. Nama lengkap : ANTONIUS, SH
Alamat : UJUNG GADING
Pekerjaan/Jabatan : ANGGOTA DPRD
21. Nama lengkap : MUSDALIFAH
Alamat : SILAPING
Pekerjaan/Jabatan : GURU AGAMA
22. Nama lengkap : Ust. TAJRI, S.Ag
Alamat : GUNUNG TULEH
Pekerjaan/Jabatan : GURU AGAMA
23. Nama lengkap : Ust. ABDUL KARIM
Alamat : KUAMANG
Pekerjaan/Jabatan : GURU AGAMA
24. Nama lengkap : Ust. Drs. NU'IM LUBIS
Alamat : UJUNG GADING
Pekerjaan/Jabatan : GURU AGAMA
25. Nama lengkap : SAPTA RIADI
Alamat : TALAMAU
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
26. Nama lengkap : MUHARNI
Alamat : TALAMAU
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
27. Nama lengkap : GUSIRWAN MAJO SADEWO
Alamat : TALAMAU
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA

28. Nama lengkap : MULIA RESKI
Alamat : TALAMAU
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
29. Nama lengkap : MIKDAR PILIANG
Alamat : PASAMAN BARAT
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
30. Nama lengkap : Drs. SUPRIMAN
Alamat : UJUNG GADING
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
31. Nama lengkap : PASRIAL
Alamat : SASAK
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
32. Nama lengkap : ALMAIZAR
Alamat : JAMBAK
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
33. Nama lengkap : ADE ERLANGGA
Alamat : SASAK
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA

Demikian untuk menjadi maklum.

Simpang Empat, 2 APRIL 2010
Yang mengajukan

CALON BUPATI
Kabupaten Pasaman Barat

(Drs. H. BAHARUDDIN, R.MM)

CALON WAKIL BUPATI
Kabupaten Pasaman Barat

(H. SYAHRUL, Dt. MARAJO, S.Pd)

Tembusan:

- 1 (Satu) Rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (Satu) Rangkap untuk KPU kabupaten Pasaman Barat
3. 1 (Satu) Rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat
4. 1 (Satu) Rangkap untuk Polres Pasaman Barat.



**PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PIMPINAN CABANG
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Alamat : Jalan Simpang Empat – Ujung Gading No. 76 A Telp (0753) 466396 Fax. 466396

Nomor : 16/ DPC PPP / PB / IV - 2010

Simpang Empat, 14 April 2010

Lamp : 1 rangkap

Hal : **LAPORAN MEKANISME PENJARINGAN
CALON BUPATI / BALON WAKIL BUPATI DARI PARTAI
PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. PASAMAN BARAT.**

Kepada,
Yth, Bapak Ketua KPUD Kab Pasaman Barat

Di. Simpang Empat.

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Dengan Hormat.

Teriring do'a semoga Bapak selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktifitas sehari – hari. Amin.

Bersama ini kami laporkan Mekanisme Penjaringan Calon Bupati / Balon wakil Bupati dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak dan kami ucapkan terima kasih Wassalam.

Dewan Pimpinan Cabang
Partai Persatuan Pembangunan
Kabupaten Pasaman Barat.

Ketua

Sekretaris

(Drs. H. BAHARUDDIN. R. MM)

(H. SUDIRMAN SAMIN)



PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PIMPINAN CABANG KABUPATEN PASAMAN BARAT

Alamat : Jalan Simpang Empat – Ujung Gading No. 76 A Telp (0753) 466396 Fax. 466396

MEKANISME PENJARINGAN BAKAL CALON BUPATI / WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pendahuluan.

Sehubungan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor, 0164/KPTS/DPP.PPP/V-2007 Tanggal 03 Mei 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan Calon Bupati / Wakil Bupati. maka dalam Rangka Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010, harus berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan harapan Partai. Maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat perlu melaksanakan Pemantauan, Penjaringan dan melakukan proses tahapan Pemilu Kada sesuai dengan Ketentuan KPU.

Agar kegiatan tersebut berjalan dengan tertib dan lancar dipandang perlu dibentuk Tim Desk Pemilu Kada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat.

LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN PENJARINGAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI.

- I. Mengingat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan serta Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan hasil Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 05 Januari 2010. Memutuskan Susunan Tim Desk Pemilu Kada Kabupaten Pasaman Barat, dengan Surat Keputusan No : 01/SK/DPC PPP/PB/I-2010 dengan susunan Tim Desk Pemilu Kada sebagai berikut :

Penanggung jawab : Ketua DPC PPP Pasaman Barat

Drs. H. BAHARUDDIN. R.MM.

Ketua : **H. SUDIRMAN SAMIN.**

Sekretaris : **WISMELNI. SK.SP.**

Anggota : **Drs. JASMAN TANJUNG.**

: **H. NASRIAL. BA**

: **H. AKHYAR.**

- II. Untuk menyatukan Pemahaman sebelum melaksanakan tahapan penjaringan Calon Bupati / Wakil Bupati. Tim Desk Pemilu Kada DPC PPP Kabupaten Pasaman Barat, terlebih dahulu meminta arahan dari Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Barat (**H. EPIARDI ASDA. M.MAR**) dan Tim Desk Pemilu Kada Tingkat provinsi.

Rapat tersebut diadakan pada tanggal 12 Februari 2010 di kantor DPW PPP Sumatera Barat di Padang.

Dengan keputusan :

1. Calon Bupati dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat, harus dari Kader Partai.
2. Menetapkan “ **Drs.H. BAHARRUDDIN. R. MM** ” sebagai calon Bupati Pasaman Barat.

3. Tidak membuka pendaftaran untuk Calon Bupati lagi.
4. Mengumumkan dibuka Pendaftaran Balon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010 – 2015 dan member kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendaftar.
5. Jadwal Pendaftaran Balon Wakil Bupati, tanggal 15 s/d 25 Februari 2010.
Yang akan berpasangan dengan “ Drs.H.BAHARUDDIN.R.MM ”.
6. Pendaftaran ini di umumkan melalui mas media (Singgalang edisi 15 Februari 2010).
7. Pemasangan Spanduk Penerimaan Pendafrtran Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat periode 2010 – 2015 di Kantor DPC PPP Pasaman Barat.

III. Seleksi Administrasi.

1. Yang Mengambil Formulir pendaftaran 7 Orang.
 - 1) H. SYAHRUL. Dt. MARAJO. S.Pd. MM.
 - 2) SYAHMINAN
 - 3) LETKOL. ZUHAILI LUBIS.
 - 4) YULIANTO. SH
 - 5) EPISANTOSO. SP
 - 6) YASMARWIN. S.Pd
 - 7) ZULKENEDI SAID.S.Sos.
 2. Yang mengembalikan formulir pendaftaran 5 orang.
 - 1) H. SYAHRUL. Dt. MARAJO. S.Pd. MM.
 - 2) SYAHMINAN
 - 3) LETKOL. ZUHAILI LUBIS
 - 4) YASMARWIN. S.Pd
 - 5) ZULKENEDI SAID
 3. Hasil klarifikasi Tim Desk Pemilu kada DPC PPP Kabupaten Pasaman Barat, yang memenuhi persyaratan administrasi adalah 3 orang.
 - 1) H. SYAHRUL. Dt. MARAJO. S.Pd. MM
 - 2) YASMARWIN. S.Pd
 - 3) ZULKENEDI SAID. S.Sos
- IV. Tim Desk Pemilu Kada Kabupaten Pasaman Barat menjadwalkan pertemuan dengan Calon Bupati dan Balon Wakil Bupati pada hari Kamis, 04 Maret 2010 di kantor DPC PPP Kabupaten Pasaman Barat. Ketiga Balon Wakil Bupati di undang oleh Tim Desk Pemilu Kada DPC PPP Kabupaten Pasaman Barat.
- V. Berpedoman kepada AD / ART Partai Persatuan Pembangunan serta Juklak dan Juknis Penjarinagan Balon Wakil Bupati, setelah dilaksanakan Penjaringan oleh Tim Desk Pemilu Kada DPC PPP Kabupaten Pasaman Barat maka Tiga Balon Wakil Bupati yang lolos dalam Penjaringan di laporkan kepada Tim Desk Pemilu Kada DPW PPP Provinsi Sumatera Barat.
- VI. Tim Desk Pemilu Kada DPW PPP Provinsi Sumatera Barat menjadwalkan Pertemuan dengan Tim Desk Pemilu Kada DPC PPP Kabupaten Pasaman Barat serta menghadirkan Calon Bupati dan Balon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat pada hari Senin, 15 Maret 2010.
- VII. Tim Desk Pemilu Kada DPW PPP Provinsi Sumatera Barat melaporkan dua orang nama Balon Wakil Bupati yang telah diseleksi ke **DEWAN.PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI JAKARTA.**

- VIII. Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, No : 35/SK/03/III/2010, Tanggal 23 Maret 2010, TENTANG PENETAPAN PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
Drs. H. BAHARUDDIN. R.MM DENGAN
H. SYAHRUL, Dt. MARAJO. S.Pd. MM.
- IX. DPW PPP Provinsi Sumatera Barat menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Untuk mendaftarkan Pasangan Calon ke KPUD Kab. Pasaman Barat sebagai peserta dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat 2010.
- IX. Alhamdulillah hari senin tanggal 05 april 2010 telah dilaksanakan Deklarasi Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati dari Partai Persatuan Pembangunan tersebut dengan didukung oleh 16 Partai Koalisi.

Penutup

Tim Desk Pemilu Kada DPC PPP Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan Mekanisme sesuai dengan Tahapan – tahapan Pemilihan , mulai dari Proses Pemantauan Calon, Penjaringan sampai kepada proses mengusulkan Calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Masa Bakti 2010 – 2015. Dan sudah mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

Demikianlah laporan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana perlunya.

Simpang Empat, 14 April 2010

Dewan Pimpinan Cabang
Partai Persatuan pembangunan
Kabupaten Pasaman Barat

Ketua

Sekretaris

(Drs.H.BAHARUDDIN. R.MM)

(H. SUDIRMAN SAMIN)

**MEKANISME PENJARINGAN BAKAL CALON BUPATI / WAKIL BUPATI
PASAMAN BARAT
HASIL KESEPAKATAN PARTAI KOALISI BANGKIT BERSAMA**

Pendahuluan.

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, seiringan dengan itu, maka pemilihan Calon Bupati (PILKADA) akan segera dilaksanakan. Untuk itulah beberapa partai – partai yang tidak memiliki Parlemen (DPRD) maka perlu adanya penyatuan Visi dan Misi untuk mengusung kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Langkah – langkah Pelaksanaan:

1. mengingat kondisi Pasaman Barat yang semakin lama semakin terpuruk, maka Partai – partai menyatukan Visi – Misinya dengan memilih Calon Bupati dengan berbagai kriteria:
 - Profesional dan berpengalaman
 - Peduli terhadap Partai – partai Koalisi
 - Mengutamakan kesejahteraan Rakyat dengan mengedepankan Diatas Tadab Agama.
 - Siap bekerja sama dengan Partai Koalisi
2. Maka terhimpunlah beberapa Partai Non Parlemen antara lain
 - PARTAI GERINDRA
 - PARTAI PMB
 - PARTAI BARNAS
 - PARTAI PPPI
 - PARTAI PPI
 - PARTAI KEDAULATAN
 - PARTAI BURUH
 - PARTAI PDK
 - PARTAI PDP
 - PARTAI PKPB
- Yang disepakati Pada tanggal 12 Desember 2009 di Hotel Ega Asri.
3. dari hasil kesepakatan Pimpinan Partai Koalisi Non Parlemen maka mencuatlah nama Bapak. Drs. H. BAHARUDDIN, R.MM Sebagai Calon Bupati yang layak dan sesuai dengan Kriteria yang diinginkan oleh Koalisi Partai Non Parlemen.

Seleksi Calon Wakil Bupati :

1. berdasarkan dari rapat – rapat Tim Koalisi bangkit bersama beserta dengan Calon Wakil Bupati maka diusunglah nama – nama Calon Wakil Bupati:
 - H. SYAHRUL, Dt, MARAJU, S.Pd
 - H. RISNAWANTO, SE
 - ZULKENEDI SAID, S.Pd
 - Drs. HELMI ERAWADI
 - JULIANTO, SH
 - Drs. H. SYAWAL SURO
 - Drs. ZAMBRI
2. Hasil klarifikasi Tim Koalisi bangkit bersama yang memenuhi Kriteria:
 - H. SYAHRUL, Dt, MARAJU, S.Pd
 - YULIANTO, SH
 - Drs. H. SYAWAL SURO
3. Setelah diadakan seleksi dan verifikasi dari ketiga kandidat yang mengerucut, maka pada tanggal 27 Maret 2010. di Hotel Nikita Bukittinggi di putuskanlah Bapak H. SYAHRUL, Dt, MARAJU, S.Pd. Sebagai Calon Wakil Bupati yang dianggap sangat layak untuk mendampingi Bapak Drs. H. BAHARUDDIN, R MM Sebagai Calon Bupati

Penutup:

Demikianlah Pelaksanaan mekanisme sesuai dengan tahapan dari proses pemantauan dan Seleksi, Ferifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung dari Tim Koalisi Bangkit Bersama.

Simpang Empat, 14 April 2010.



SURAT PENCALONAN

Nomor : 06/BC/PP/IV-2010

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, bersama ini diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan adalah :

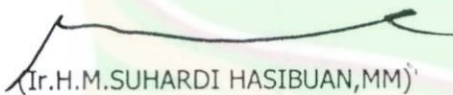
1. Calon Bupati : Drs.H.AKMALUDDIN BATUBARA,MM
2. Calon Wakil Bupati : EPISANTOSO,SP

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Simpang Empat, April 2010
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik
yang mengajukan Pasangan Calon

Partai Amanat Nasional

Ketua DPD
Kabupaten Pasaman Barat

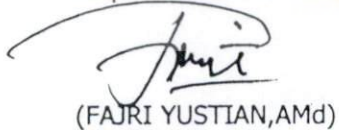

(Ir.H.M.SUHARDI HASIBUAN,MM)

Sekretaris DPD
Kabupaten Pasaman Barat



Partai Keadilan Sejahtera

Ketua DPD
Kabupaten Pasaman Barat


(FAJRI YUSTIAN,AMd)

Sekretaris DPD
Kabupaten Pasaman Barat



**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan April tahun dua ribu sepuluh bertempat di Simpang Empat, yang bertanda tangan dibawah ini gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Kabupaten Pasaman Barat

1. Partai Amanat Nasional dan
2. Partai Keadilan Sejahtera

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Simpang Empat, April 2010
Dewan Pimpinan Daerah /
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah
Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon

Partai Amanat Nasional

Ketua DPD
Kabupaten Pasaman Barat

(Ir.H.M.SUHARDI HASIBUAN,MM)

Sekretaris DPD
Kabupaten Pasaman Barat

(ERWIN)

Partai Keadilan Sejahtera

Ketua DPD
Kabupaten Pasaman Barat

(FAJRI YUSTIAN,AMd)

Sekretaris DPD
Kabupaten Pasaman Barat

(SUPRIONO,STP)

**SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Pasaman Barat

Menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Simpang Empat, April 2010
Dewan Pimpinan Daerah
Partai Amanat Nasional
Yang mengajukan Pasangan Calon

Ketua DPD
Kabupaten Pasaman Barat

(Ir.H.M.SUHARDI HASIBUAN,MM)



Ketaris DPD
Kabupaten Pasaman Barat

(ERWIN)

**SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pasaman Barat

Menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Simpang Empat, April 2010
Dewan Pengurus Daerah
Partai Keadilan Sejahtera
Yang mengajukan Pasangan Calon

Ketua DPD
Kabupaten Pasaman Barat

(FAJRI YUSTIAN, AMd)

Sekretaris DPD
Kabupaten Pasaman Barat

(SUPRIONO, STP)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, gabungan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

1. Partai Amanat Nasional dan
2. Partai Keadilan Sejahtera

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

Demikian surat pernyataan ini dimuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Simpang Empat, April 2010
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah
Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon

Partai Amanat Nasional

Ketua DPD
Kabupaten Pasaman Barat

(Ir.H.M.SUHARDI HASIBUAN,MM)

Sekretaris DPD
Kabupaten Pasaman Barat

(ERWIN)

Partai Keadilan Sejahtera

Ketua DPD
Kabupaten Pasaman Barat

(FAJRI YUSTIAN,AMD)

Sekretaris DPD
Kabupaten Pasaman Barat

(SUPRIONO,STP)

**NAMA TIM KAMPANYE DAN JURU KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2010**

Nama pasangan calon : 1. Drs.H.AKMALUDDIN BATUBARA,MM
Bupati dan Wakil Bupati
2. EPISANTOSO,SP

Nomor Rekening khusus dana : 1. **BASRUL EFENDI**
kampanye Pasangan calon dan tim : 2. **FAJRI YUSTIAN**
kampanye

Bersama ini mengajukan nama tim kampanye dan juru kampanye pasangan calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap : PATRIALIS AKBAR
Alamat : Jakarta
Pekerjaan/Jabatan : Menteri Hukum dan Ham
2. Nama lengkap : Ir.TIFATUL SEMBIRING
Alamat : Jakarta
Pekerjaan/Jabatan : Menkominfo
3. Nama lengkap : Ir.H.M.SUHARDI HASIBUAN,MM
Alamat : Medan
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPD PAN Pasaman Barat
4. Nama lengkap : Ir.YOSMERI Yusuf
Alamat : Padang
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
5. Nama lengkap : Dr.ACHMAD NAMLIS,MM
Alamat : Ujung Gading
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panda DPW PAN Sumbar
6. Nama lengkap : Drs.MARHADI EFENDI
Alamat : Padang
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
7. Nama lengkap : YANDRI,SPd,MPd
Alamat : Padang
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua DPW PAN Sumbar

8. Nama lengkap : SYAFRIZAL MANDAYU,SH,MM
Alamat : Padang Durian Hijau
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua DPD PAN Pasaman Barat
(Ketua Tim Pilkada DPD PAN Pasaman Barat)
9. Nama lengkap : ERWIN
Alamat : Kinali
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD PAN Pasaman Barat
10. Nama lengkap : SUHARDIANTO
Alamat : Giri Maju
Pekerjaan/Jabatan : Bendahara DPD PAN Pasaman Barat
11. Nama lengkap : NASRULLOH NUKMAN,SH
Alamat : Padang Panjang
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
12. Nama lengkap : Drs.SYAURIUM
Alamat : Jakarta
Pekerjaan/Jabatan : Musrif Sumbar DPP PKS
13. Nama lengkap : H.MUSLIM M YATIM,Lc
Alamat : Padang
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Pemda V DPW PKS Sumbar
14. Nama lengkap : FAJRI YUSTIAN AMd
Alamat : Katimahar Simpang Empat
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPD PKS Pasaman Barat
15. Nama lengkap : SUPRIONO,STP
Alamat : Bandarejo
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD PKS Pasaman Barat
16. Nama lengkap : ABRI MAIJON,SPd
Alamat : Simpang Empat
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bid.Kebijakan Publik DPD PKS Pasaman Barat
17. Nama lengkap : MASNIL,SP
Alamat : Pasaman Baru
Pekerjaan/Jabatan : Ketua BPK DPD PKS Pasaman Barat

Demikian untuk menjadi maklum.

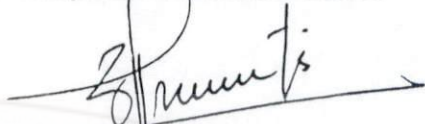
Simpang Empat, April 2010
Yang mengajukan

Calon Bupati
Kabupaten Pasaman Barat



(Drs.H.AKMALUDDIN BATUBARA,MM)

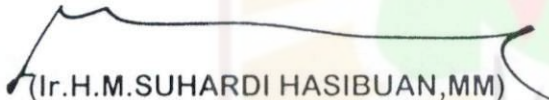
Calon Wakil Bupati
Kabupaten Pasaman Barat



(EPISANTOSO,SP)

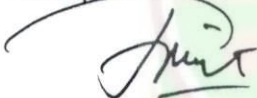
Mengetahui
Partai politik

Ketua DPD
Partai Amanat Nasional
Kabupaten Pasaman Barat



(Ir.H.M.SUHARDI HASIBUAN,MM)

Ketua DPD
Partai Keadilan Sejahtera
Kabupaten Pasaman Barat



(FAJRI YUSTIAN,AMd)

Sekretaris DPD
Partai Amanat Nasional
Kabupaten Pasaman Barat



(ERWIN)

Sekretaris DPD
Partai Keadilan Sejahtera
Kabupaten Pasaman Barat



(SUPRIONO,STP)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Jumlah nama tim kampanye dan juru kampanye dapat disesuaikan
3. Formulir Model AB-KWK dapat digunakan untuk KPU Provinsi dan KPU Kab/kota

SURAT PENCALONANNo. 01/GP/SA/IV/2010

No.

No.

No.

No.

No.

No.

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, bersama ini diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat oleh Dewan Pimpinan Daerah) Kabupaten Pasaman Barat Partai GOLKAR, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Patriot, Partai Pakar Pangan, Partai Barisan Nasional (Partai Barnas), PPIB, *Republik*

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan adalah :

1. Calon Bupati : **DRS. H. SYAHIRAN, MM**
2. Calon Wakil Bupati : **ASGUL, SE, M. Si.**

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Simpang Empat, 2 April 2010

Dewan Pimpinan Daerah/

**Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik
yang mengajukan Pasangan Calon *)**

Ketua DPD/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

(DRS. HASBI SANI)



Sekretaris DPD/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

(WASMAN, S. Sos.)

Partai BULAN BINTANG (PBB)

Ketua DPD/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPD/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

(.....)

(.....)

Partai KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

Ketua DPD/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPD/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

(YUSUARDI)

(PARMOHONAN SIMAMORA)



Partai PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA (PPDI)

Ketua DPD/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPD/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

(AHMAD DUSKI)

(ULFA)



Partai PATRIOT

Ketua DPD/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPD/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

(FITRAN NASRI)

(Ir. PARIZAL HAFNI, ~~PA~~)



Partai PAKAR PANGAN

Ketua DPD/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPD/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

(.....)

(.....)

Partai BARISAN NASIONAL (BARNAS)

Ketua DPD/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

Sekretaris DPD/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

Partai REPUBLIKA NUSANTARA

Ketua DPB/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

(.....
.....
.....)



Sekretaris DPB/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

(.....
.....
.....)

Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)

Ketua DPB/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

(.....
.....
.....)



Sekretaris DPB/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

(.....
.....
.....)



SURAT PENCALONAN

Nomor : 01.1.DP.10/11 - 2010

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, bersama ini diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat oleh Dewan Pimpinan Daerah) Kabupaten Pasaman Barat Partai **Patriot**

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan adalah :

1. Calon Bupati : **Drs H. Syahiran MM**
2. Calon Wakil Bupati : **Asgul, SE Ms.I**

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Simpang Empat, 29 Maret 2010
Dewan Pimpinan Daerah/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik
yang mengajukan Pasangan Calon *)

Ketua DPD/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

(**FITRAN NASRI**)

Partai



Sekretaris DPD/ DPC *
Kabupaten Pasaman Barat

(**IR. PARIZAL HAFNI.**)

MENYETUJUI

Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Barat
Partai Patriot

Ketua DPD

(**SYAIFUL, SH. MM**)



Cap

Sekretaris DPD

(**ERNITA, SH.**)



DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA KABUPATEN PASAMAN BARAT SUMATERA BARAT

Sekretariat : Jl. Tabek Pala Telp. 081363267568

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN WAWANCARA CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu sepuluh bertempat di Simpang Empat, yang bertanda tangan dibawah ini Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Pasal 59 ayat (5) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, serta Notulen rapat pengurus tanggal 10 Januari 2010

Memperhatikan hasil pendaftar yang telah diselenggarakan mulai tanggal 12 – 13 Januari 2010, Bakal calonb Bupati / Wakil Bupati yang mencalonkan diri adalah sbb :

1. Drs. H. Syahiran MM	Calon Bupati	Adm Lengkap
2. Asgul , SE, M.Si	Calon Bupati	Adm Lengkap
3. Anwir Dt Bandaro	Calon Wakil Bupati	Adm Tidak lengkap
4. Kharul Amri	Calon Wakil Bupati	Adm Tidak lengkap

Setelah diulakukan pemeriksaan administrasi dan wawancara kesiap calon, berdasarkan hasil musyawarah pengurus dengan ini ditetapkan pasangan calon untuk dimintakan persetujuan DPW adalah sbb;

1. Calon Bupati	Drs. H. Syahiran MM
2. Calon Wakil Bupati	Asgul , SE , M.Si

Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih.

Partai Partai Penegak Demokrasi Indonesia
Kabupaten Pasaman Barat

Ketua

(Ahmad Duski)



Sekretaris

(Ulfa)



**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
KABUPATEN PASAMAN BARAT
SUMATERA BARAT**

Sekretariat : Jl. Tabek Pala Telp. 081363267568

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA PENGURUS PARTAI POLITIK PENEGAK DEMOKRASI
INDONESIA UNTUK PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENCALONAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini Minggu tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu sepuluh bertempat di Simpang Empat, yang bertanda tangan dibawah ini Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Pasal 59 ayat (5) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dengan ini menetapkan proses penjurangan bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Pasaman Barat Priode 2010 – 2015, sbb

No	Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon	12 – 13 Jan 2010
2	Penerimaan Pendaftaran	14 – 16 Jan 2010
3	Seleksi Administratif dan wawancara	20 – 25 Jan 2010
4	Sanggahan dari Masyarakat	26 Jan – 30 Maret 2010
5	Persetujuan DPW	31 Maret – 7 April 2010

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

Simpang Empat, 10 Januari 2010

Dewan Pimpinan Cabang

**Partai Partai Penegak Demokrasi Indonesia
Kabupaten Pasaman Barat**

Ketua


(Ahmad Duski)



Sekretaris


(Ulfa)

DPC Partai Golkar Kab. Pasaman Barat

Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas terpilihnya

HI. DARMAWIS SIDDIK
SEBAGAI KETUA PWI

KULISON PWI
SEKRETARIS PWI

MASRII SPd
BENDHARA

KETUA SEKSI ORGANISASI, YUSIRAN PARSELA SS
KETUA SEKSI PENDIDIKAN & PELATIHAN, YULISMAN, AMA
KETUA SEKSI KEAGAMAAN, CUSMIZAR, SAG BUSA
KETUA SEKSI HUKUM DAN PEMBELAJARAN, BASRI NAL, SAG
KETUA SEKSI KESRA, NEPIRAN YUNADI, SAG
KETUA SEKSI OLAHIRAGA & SENI, SUYATNO, LUBIS

PERWAKILAN KAB. PASAMAN BARAT

PERIODE 2010-2013

DALAM KONFERENSI KEURPWI KAB. PASAMAN BARAT

II JANUARI 2010 DI GEDUNG REMON KAB. PASAMAN BARAT

Yang Dikukuhkan Oleh: Basri Basri, M. (Ketua PWI Cabang Sumber)

Dengan Semangat Persatuan Dan Keatuan Marka Bendahara

Pasaman Barat Ke Depan

Drs. Hasbi Sani
Ketua

Wasman S. Sos
Sekretaris

Amir
Bendahara

SETELAH DITELITI

FOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA

MEMGETAHUI :

KETUA DPD PARATI GOLKAR PASAMAN BARAT

Selasa, 2 Februari 2010 (17 Syafar 1431 H)

DRS. HASBI SANI

DEPARTAI
GOLKAR
KABUPATEN
PASAMAN BARAT

PENGUMUMAN

Dalam rangka memasuki Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan salah satu catur sukses program umum Partai Golongan Karya (Golkar). Maka dari itu DPD II Partai Golongan Karya Pasaman Barat membuka seluas-luasnya bagi tokoh dan masyarakat Pasaman Barat untuk sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Golkar.

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Februari 2010 sampai 7 Februari 2010. Dan pengembalian formulir selambat-lambatnya pada tanggal 7 Februari 2010 pukul 00.00 Wib.

Demikianlah pengumuman ini dibuat.

DPD II PARTAI GOLONGAN KARYA PASBAR

Ttd
HASBI SANI
Ketua

Ttd
WASMAN
Sekretaris

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP - PDI PERJUANGAN)

Jakarta, 31 Maret 2010

Nomor : 3409 /IN/DPP/ 47 /2010
Lampiran : ---
Perihal : REKOMENDASI

Yth. DPC PDI PERJUANGAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
di
Pasaman Barat

Merdeka !!!

Memperhatikan surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/IN/DPD/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal Permohonan Rekomendasi, maka Rapat DPP PDI Perjuangan pada tanggal 25 Maret 2010 memutuskan sebagai berikut :

1. Setelah mempelajari perkembangan PDI Perjuangan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan demi kepentingan Partai secara umum, DPP PDI Perjuangan menetapkan untuk merekomendasikan Sdr. H. RISNAWANTO, S.E. untuk dijadikan satu-satunya calon Bupati Pasaman Barat yang diajukan dari PDI Perjuangan.
2. Dalam memilih dan menentukan calon Wakil Bupati Pasaman Barat dari PDI Perjuangan, DPP Partai menyerahkan kepada Sdr. H. RISNAWANTO, S.E. sebagai calon Bupati Pasaman Barat yang direkomendasi bersama-sama dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasaman Barat, DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat dan berkoordinasi dengan DPP PDI Perjuangan untuk menetapkan calon Wakil Bupati Pasaman Barat yang menjadi pasangannya secara selektif, dengan terlebih dahulu mempelajari dan mencermati perkembangan secara umum di wilayah Kabupaten Pasaman Barat demi memenangkan pemilihan kepala daerah tersebut.
3. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasaman Barat diinstruksikan untuk mengajukan Sdr. H. RISNAWANTO, S.E. sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat yang menjadi pasangannya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dari PDI Perjuangan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
4. Untuk itu, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh jajaran Partai, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasaman Barat, bersama-sama dengan seluruh kader, aktivis, dan anggota PDI Perjuangan di Kabupaten Pasaman Barat, untuk mengamankan, menjalankan dan memperjuangkan terpilihnya Sdr. H. RISNAWANTO, S.E. dan pasangannya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat periode 2010 - 2015.
5. Kepada mereka yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas keluar dari kebijakan ini, akan diberikan sanksi organisasi.

Demikian penetapan rekomendasi dan instruksi ini disampaikan, untuk dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh kader Partai dengan penuh tanggung jawab.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Masa Bakti 2005 - 2010

Ketua,



TJAHJO KUMOLO, S.H.

Sekretaris Jenderal,



Ir. PRAMONO ANUNG W, M.M.

Tembusan Yth.:

1. DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat
2. Yang bersangkutan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734 Fax. 021 (79180765)

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

NO : SKR.PP/2120/2010

Tentang

BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN PASAMAN BARAT - PROVINSI SUMATERA BARAT
MEWAKILI PARTAI BULAN BINTANG
PERIODE 2010 - 2015

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

- Membaca : Berita Acara Rapat Pleno Khusus Partai (RPKP) Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat tanggal 25 Maret 2010 Rekomendasi Penetapan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010 - 2015.
- Menimbang : a. Bahwa peran Partai Bulan Bintang dalam lembaga eksekutif perlu dioptimalkan sesuai potensi, visi dan misi Partai serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa dalam rangka mengambil peran serta aktif dalam pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, maka Partai Bulan Bintang memandang perlu mengajukan pasangan Bakal Calon Bupati / Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.
- c. Bahwa pasangan Bakal Calon Bupati / Bakal Calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Khusus DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Pasaman Barat adalah pasangan **H. Risnawanto, SE** sebagai Bakal Calon Bupati dan **H. Nofrizal, S.Pd.** sebagai Bakal Calon Wakil Bupati ditetapkan dengan mengesahkan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010 - 2015.
- d. Bahwa untuk itu, berdasarkan kajian kelengkapan administrasi para Bakal Calon dan presentasi salah satu Bakal Calon maka dipandang perlu segera menerbitkan Surat Keputusan ini untuk menetapkan dan mengesahkan Pasangan Bakal Calon Bupati / Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat yang dipandang layak untuk mendapat dukungan Partai Bulan Bintang.

Mengingat

1. Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17.
2. Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang Pasal 11 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40.
3. Pedoman Organisasi Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 42.
4. Surat Keputusan DFP Nomor : SK.PP/662/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Rekrutmen Pejabat Publik PARTAI BULAN BINTANG Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (2).
5. Surat Keputusan DPP Nomor : SK.PP/1616/2009

Memperhatikan : Keputusan Rapat Harian Khusus DPP Partai Bulan Bintang, tanggal 1 April dan 6 April 2010.

Dengan bertawakkal pada Allah SWT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG TENTANG BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT - PROVINSI SUMATERA BARAT MEWAKILI PARTAI BULAN BINTANG PERIODE 2010 - 2015

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/2114/2010, tanggal 16 Rabiul Akhir 1431 H/01 April 2010 M tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat. Provinsi Sumatera Barat Periode 2010 - 2015.

KEDUA : Mengesahkan Saudara H. Risnawanto, SE sebagai Bakal Calon Bupati dan H. Nofrizal, S.Pd. sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat yang didukung DPC PARTAI BULAN BINTANG Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Periode 2010 - 2015.

KETIGA : Hal-hal yang berhubungan dengan proses pencalonan, pemilihan dan penetapan jabatan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, sepenuhnya diatur melalui mekanisme/ Tata tertib dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Surat Keputusan ini dapat diubah/ ditambah/diperbaiki.

Ditetapkan di : Jakarta
21 Rabiul Akhir 1431 H

Pada tanggal : 06 April 2010 M

Dewan Pimpinan Pusat
PARTAI BULAN BINTANG

Ketua Umum

DR. H.MS. Kaban, SE., M.St.



Sekretaris Jenderal

Drs. H. Sahar L. Hassan



DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Markas Wilayah : Jl. S. Parman No. 106 A. Lolong Padang ☎/ Fax(0751) 705210

SURAT REKOMENDASI

No : B.582//PWSB-Sek/03/1431

Sehubungan dengan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Pasaman Barat No : A. 003/PCPB- Sek/03/1431 tanggal 29 Maret 2010 tentang mohon rekomendasi Bakal Calon Bupati Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010 -2015, dengan ini kami Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Barat menyatakan :

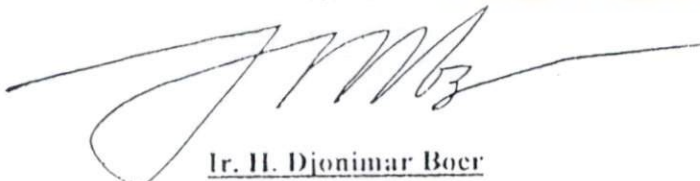
1. Dapat Menyetujui memberikan rekomendasi dari sembilan kandidat yang diajukan sebagaimana terlampir, maka ditetapkan sdr. H. Risnawanto, SE sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015 dan penetapan Bakal Calon Wakil Bupati diserahkan sepenuhnya kepada Balon Bupati.
2. Dengan terbitnya Surat rekomendasi ini, maka membatalkan segala sesuatu izin prinsip tentang proses pencalonan Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Partai Bulan Bintang sebelumnya.
3. Rekomendasi ini diterbitkan dengan mematuhi semua ketentuan-ketentuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang.

Demikianlah rekomendasi ini kami buat atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Padang, 15 Rabiul Akhir 1431 H
31 Maret 2010 M

✓ Dewan Pimpinan Wilayah
PARTAI BULAN BINTANG
Provinsi Sumatera Barat

Ketua



Ir. H. Djonimar Boer
NIA : 13.08.000.018

Sekretaris



Drs. H. Mazwar Mas'ud
NIA : 13.08.000.020

SURAT PENCALONAN
Nomor : 01/KPTS/IV/2010

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, bersama ini diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat oleh Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Bintang Reformasi, Partai Bulan Bintang

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan adalah :

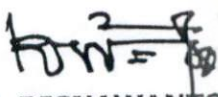
1. Calon Bupati : **H. RISNAWANTO**
2. Calon Wakil Bupati : **H. NOFRIZAL**

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.


Simpang Empat, 07 April 2010
Dewan Pimpinan Daerah/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik
yang mengajukan Pasangan Calon *)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat


H. RISNAWANTO

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat


SYAMSUL BAKHRI

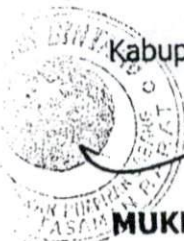


Partai Bulan Bintang

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat


SYAHRUL RAMADAN TANJUNG, S.Ag

Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat




MUKHLIS. A

Partai Peduli Rakyat Nasional

Ketua DPD
Kabupaten Pasaman Barat

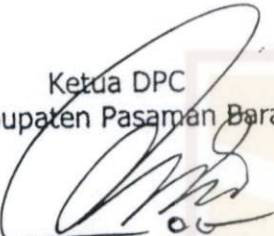

FIRMAN OEMAR



Sekretaris DPD
Kabupaten Pasaman Barat

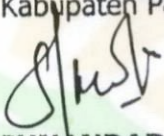

UMAR SANI

Ketua DPC
Kabupaten Pasaman Barat


ANDIK PRASETYO



Sekretaris DPC
Kabupaten Pasaman Barat


SUNANDAR

